LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

I. TATA CARA PENDISTRIBUSIAN TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

A. Kepala Seksi Pelayanan

1. Nomor Tanda Terima di buat/di cetak *prenumbered*, banyaknya disesuaikan dengan perkiraan SPT Tahunan yang akan diterima.
2. Setiap hari, Tanda Terima dibagikan kepada petugas penerima SPT Tahunan pada TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box.*
3. Pembagian Tanda Terima dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah SPT Tahunan yang akan di terima dalam satu hari.
4. Mencatat penyerahan Tanda Terima pada Kartu Pengawasan Penggunaaan Nomor Tanda Terima sebagaimana Lampiran I.1.
5. Setiap hari menerima Tanda Terima yang tidak terpakai yang dikembalikan oleh petugas penerima SPT Tahunan.
6. Pengembalian Tanda Terima yang tidak terpakai juga harus di catat pada Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT Tahunan sebagaimana Lampiran II.2.
7. Tanda Terima yang tidak terpakai tersebut dapat digunakan untuk penerimaan SPT Tahunan pada hari-hari berikutnya.

B. Petugas penerima SPT pada TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box*

1. Menerima Tanda Terima yang telah diberi nomor (prenumbered) dari Kepala Seksi Pelayanan dan menandatangani Kartu Pengawasan Penggunaan Nomor Tanda Terima.
2. Memberikan Tanda Terima yang telah ditandatangani dan diberi tanggal penerimaan SPT Tahunan dan diberi cap kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan sesuai prosedur yang di atur pada Lampiran II.
3. Setiap hari Tanda Terima yang belum terpakai dikembalikan pada Kepala Seksi Pelayanan bersamaan dengan Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT Tahunan sebagaimana Lampiran II.2 dan berkas SPT Tahunan.

II BAGAN ALUR KERJA

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

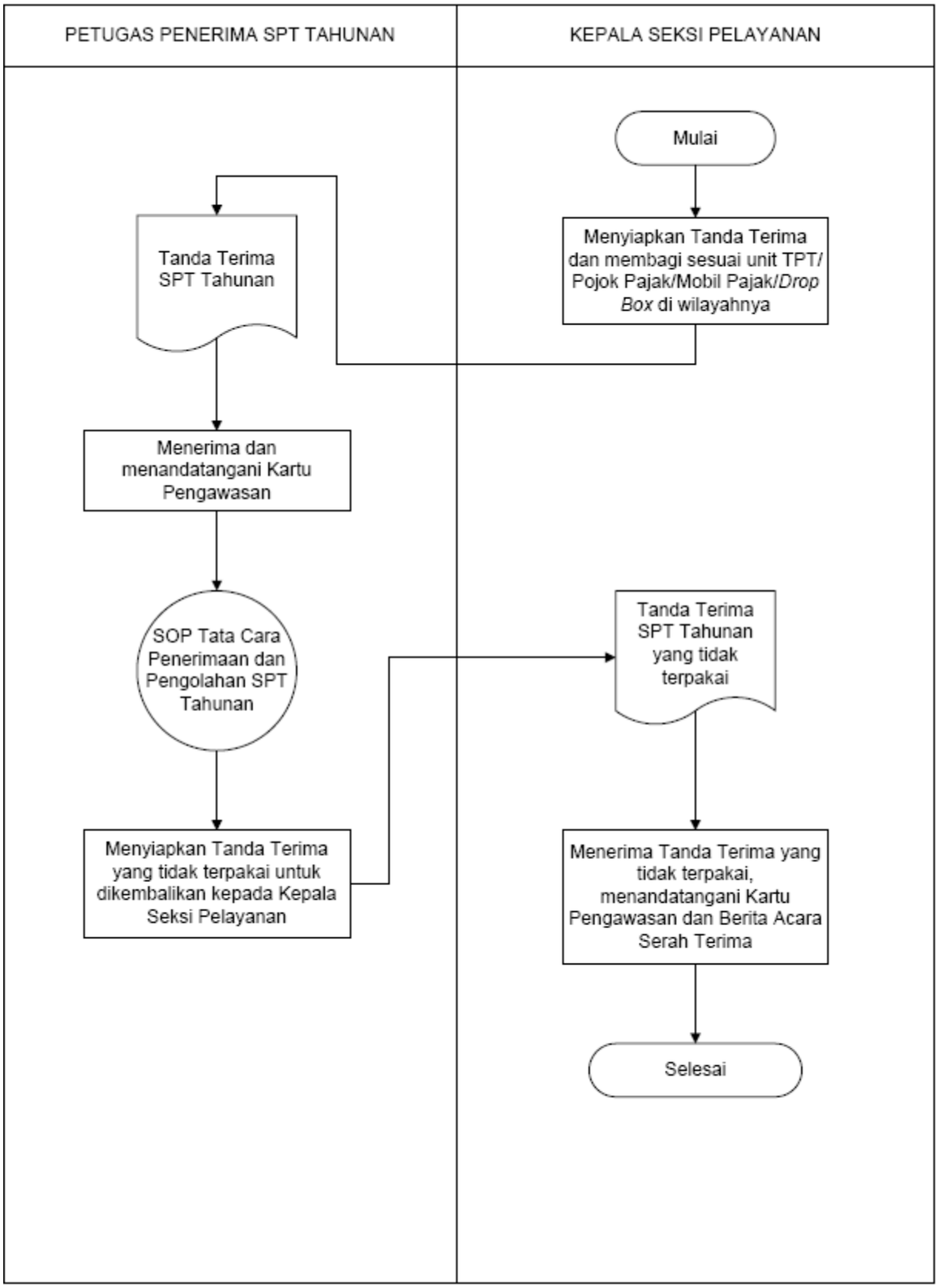

LAMPIRAN I.1
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KARTU PENGAWASAN PENGGUNAAN NOMOR TANDA TERIMA SPT

KPP .....

NO.	NAMA UNIT PENERIMAAN SPT	TANDA TERIMA YANG DISERAHKAN		TANGGAL PENYERAH-AN	NAMA DAN TANDA TANGAN PENERIMA	TANDA TERIMA YANG DIKEMBALIKAN		TANDA TANGAN PENERIMA PENGEMBALIAN	JUMLAH TANDA TERIMA YANG DIGUNAKAN
		NOMOR	JUMLAH			NOMOR	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 4 - 8)
1.									
JUMLAH									

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut, berlanjut sampai dengan akhir tahun.
2. Kolom (2) : diisi dengan Nama Unit Penerimaan SPT Tahunan (TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box*)
   contoh : TPT
   Drop Box Mal Pondok Indah dsb.
3. Kolom (3) : diisi dengan Nomor Tanda Terima yang diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan kepada Petugas Penerima SPT.
   contoh : Nomor 011-01-00000001 s.d. 011-01-00001000
   011-02-00000001 s.d. 011-02-00002000
4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah Tanda Terima yang diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan kepada Petugas Penerima SPT.
5. Kolom (5) : diisi dengan tanggal penyerahan Tanda Terima dari Kepala Seksi Pelayanan kepada Petugas Penerima SPT.
6. Kolom (6) : diisi dengan nama dan tanda tangan Petugas Penerima SPT.
7. Kolom (7) : diisi dengan Nomor Tanda Terima yang dikembalikan oleh Petugas Penerima SPT kepada Kepala Seksi Pelayanan.
   contoh : Nomor 011-01-00000901 s.d. 011-01-00001000
   011-02-00001951 s.d. 011-02-00002000
8. Kolom (8) : diisi dengan Jumlah Tanda Terima yang dikembalikan oleh Petugas Penerima SPT kepada Kepala Seksi Pelayanan.
9. Kolom (9) : diisi dengan tanda tangan Petugas yang menerima pengembalian Tanda Terima.
10. Kolom (10) : diisi dengan Jumlah Tanda Terima yang digunakan (diberikan kepada Wajib Pajak).

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

I. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

A. Petugas penerima SPT pada TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box mempunyai tugas :

1. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dalam **amplop tertutup** yang di atasnya di tulis :
   - NPWP;
   - Nama WP;
   - Tahun Pajak;
   - Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);
   - Nomor Telepon.

   KPP dapat menyediakan amplop jika Wajib Pajak memintanya. Guna mempercepat pelayanan, pada TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box* disediakan stempel/cap yang berisi informasi di atas untuk dibubuhkan di amplop. Bentuk stempel/cap adalah :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....

NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐

NAMA WP : .....

TAHUN PAJAK : ☐☐☐☐

STATUS SPT : ☐ NIHIL ☐ KB ☐ LB

NO. TELP/HP : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2. Menuliskan NPWP Wajib Pajak pada lembar "untuk Wajib Pajak", membubuhkan stempel KPP, tanggal penerimaan, nama, NIP dan tanda tangan pada Tanda Terima sebagaimana pada Lampiran II.1.
3. Memberikan Tanda Terima (*Bagian Untuk Wajib Pajak*) kepada Wajib Pajak, dan menempelkan bagian lain (*Bagian Untuk Ditempelkan pada Amplop*) pada amplop SPT Wajib Pajak. Bagian arsip disimpan untuk diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
4. Memisahkan antara SPT Tahunan/e-SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP sendiri dengan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain, serta per status SPT (KB, N dan LB) dan per jenis Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan).
5. Membuat Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT melalui TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box* sebagaimana pada Lampiran II.2.
6. Menyerahkan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang di terima dan Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT kepada Petugas Seksi Pelayanan.

B. Pelaksana Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

1. Menerima dan meneliti SPT dan Berita Acara Serah Terima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Petugas Penerima SPT, selanjutnya meneruskan ke Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani.
2. Merekam Tanda Terima dan informasi Wajib Pajak pada amplop ke dalam aplikasi pengawasan *Drop Box.*
3. Mengelompokkan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan (termasuk SPT yang di terima dari KPP lain) berdasarkan tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Dari hasil pengelompokan SPT pada angka 3, atas SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sendiri dibuatkan Daftar Nominatif Pengiriman SPT Wajib Pajak Sendiri sebagaimana Lampiran II.12 untuk kemudian dilakukan penelitian kelengkapan SPT.
5. Dari hasil penelitian kelengkapan SPT,
   a). SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang dinyatakan lengkap, di cetak Daftar Nominatif SPT Lengkap sebagaimana Lampiran II.8 dan diteruskan ke Petugas TPT untuk dilakukan perekaman penerimaan SPT; dan
   b). SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang tidak lengkap, dibuatkan Lembar Penelitian Ketidaklengkapan SPT Tahunan sebagaimana Lampiran II.10.a atau Lampiran II.10.b untuk disatukan dengan masing-masing SPT yang tidak lengkap selanjutnya diteruskan ke *Account Representative* bersama dengan Daftar Nominatif SPT Tidak Lengkap sebagaimana Lampiran II.9.
6. Dari hasil pengelompokan SPT pada angka 3, atas SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang tidak terdaftar di KPP sendiri dibuatkan/dicetak Daftar Nominatif Pengiriman SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana Lampiran II.4 dan dibuatkan konsep Surat Pengiriman SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana Lampiran II.5.
7. Meneruskan Daftar Nominatif Pengiriman SPT dan konsep Surat Pengiriman Berkas SPT ke Kepala Seksi Pelayanan untuk di teliti dan di paraf dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.
8. Menerima Surat Pengiriman dan Daftar Nominatif yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP.

9. Menatausahakan dan mengirimkan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan, Surat Pengiriman dan Daftar Nominatif sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen.
10. Menerima SPT Tahunan yang telah dilakukan perekaman penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan oleh Petugas TPT, untuk dilakukan pengemasan SPT jika pengolahan SPT dilakukan di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).
11. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah di rekam dan Register Harian dari Seksi PDI untuk selanjutnya diproses sesuai SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.
12. Dalam hal SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang di terima melalui pos/ekspedisi tidak terdaftar di KPP sendiri akibat kesalahan pengiriman, pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan ke KPP Wajib Pajak terdaftar sesuai SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen.

C. Petugas TPT mempunyai tugas :

1. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap dari Petugas Seksi Pelayanan.
2. Melakukan perekaman penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan serta *loading* e-SPT Tahunan.
3. Mencetak lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagaimana Lampiran II.3 serta register harian.
4. Meneruskan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk dilakukan perekaman detil SPT atau meneruskan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Petugas Seksi Pelayanan untuk dilakukan pengemasan SPT jika pengolahan SPT dilakukan di PPDDP.
5. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari KPP lain dan/atau dari Pos/ekspedisi untuk selanjutnya diteruskan ke Pelaksana Seksi Pelayanan untuk di teliti.
6. Menandai nomor dan tanggal Surat Pengiriman SPT dari KPP lain, serta menandai setiap SPT yang terdapat pada Daftar Nominatif Pengiriman SPT.
7. Atas Respon Surat Permintaan Kelengkapan SPT :
   a). Menerima kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak.
   b). Meneliti kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak.
   c). Mencetak dan menandatangani LPAD/BPS kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dan menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak.
   d). Meneruskan kelengkapan SPT ke *Account Representative.*
8. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap oleh *Account Representative* untuk dilakukan perekaman penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan serta *loading* e-SPT Tahunan.

D. *Account Representative* mempunyai tugas :

1. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Pelaksana Seksi Pelayanan yang dinyatakan tidak lengkap.
2. Mencetak konsep Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang terdapat di dalam aplikasi pengawasan *Drop Box*, selanjutnya meneruskan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk di teliti dan di paraf dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.
3. Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP selanjutnya Diproses sesuai SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen.
4. Menerima kelengkapan SPT dari Petugas TPT untuk digabungkan dengan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.
5. SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke Petugas TPT untuk dilakukan perekaman penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan serta *loading* e-SPT Tahunan.
6. Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan tidak dipenuhi dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan, *Account Representative* mencetak konsep Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan selanjutnya meneruskan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk di teliti dan di paraf dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.
7. Mencetak Daftar Nominatif SPT yang dianggap tidak disampaikan sebagaimana Lampiran II.11 dan mengirimkan ke Seksi PDI bersama berkas SPT yang dianggap tidak disampaikan.
8. Dalam hal terjadi kesalahan matematis dalam pengisian SPT, *Account Representative* menerbitkan Surat Himbauan Pembetulan SPT sesuai dengan SOP Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT.
9. Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian SPT dan/atau keterlambatan pembayaran pajak, *Account Representative* menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai dengan SOP Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak.

E. Petugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas :

1. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Petugas TPT yang telah di beri LPAD/BPS.
2. Merekam SPT Tahunan ke dalam basis data perpajakan.
3. Meneruskan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah direkam/di-*load* ke Seksi Pelayanan untuk selanjutnya diproses sesuai SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.
4. Mengadministrasikan Daftar Nominatif SPT yang dianggap tidak disampaikan sebagaimana Lampiran II.11 dan melaksanakan SOP Pembentukan Bank Data atas berkas SPT yang dianggap tidak disampaikan.

II. BAGAN ALUR KERJA (*FLOWCHART*)

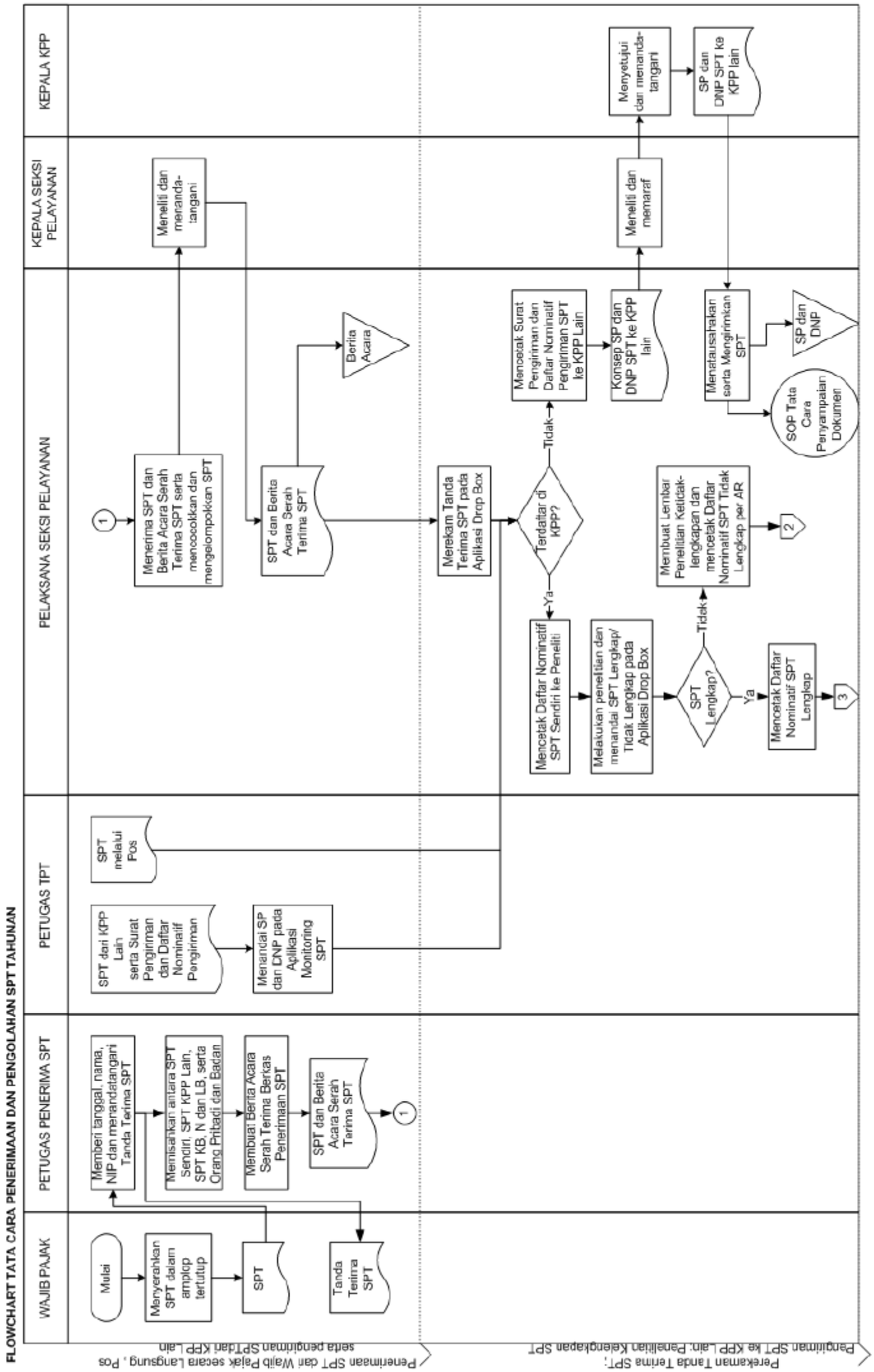

FLOWCHART TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN (Lanjutan)

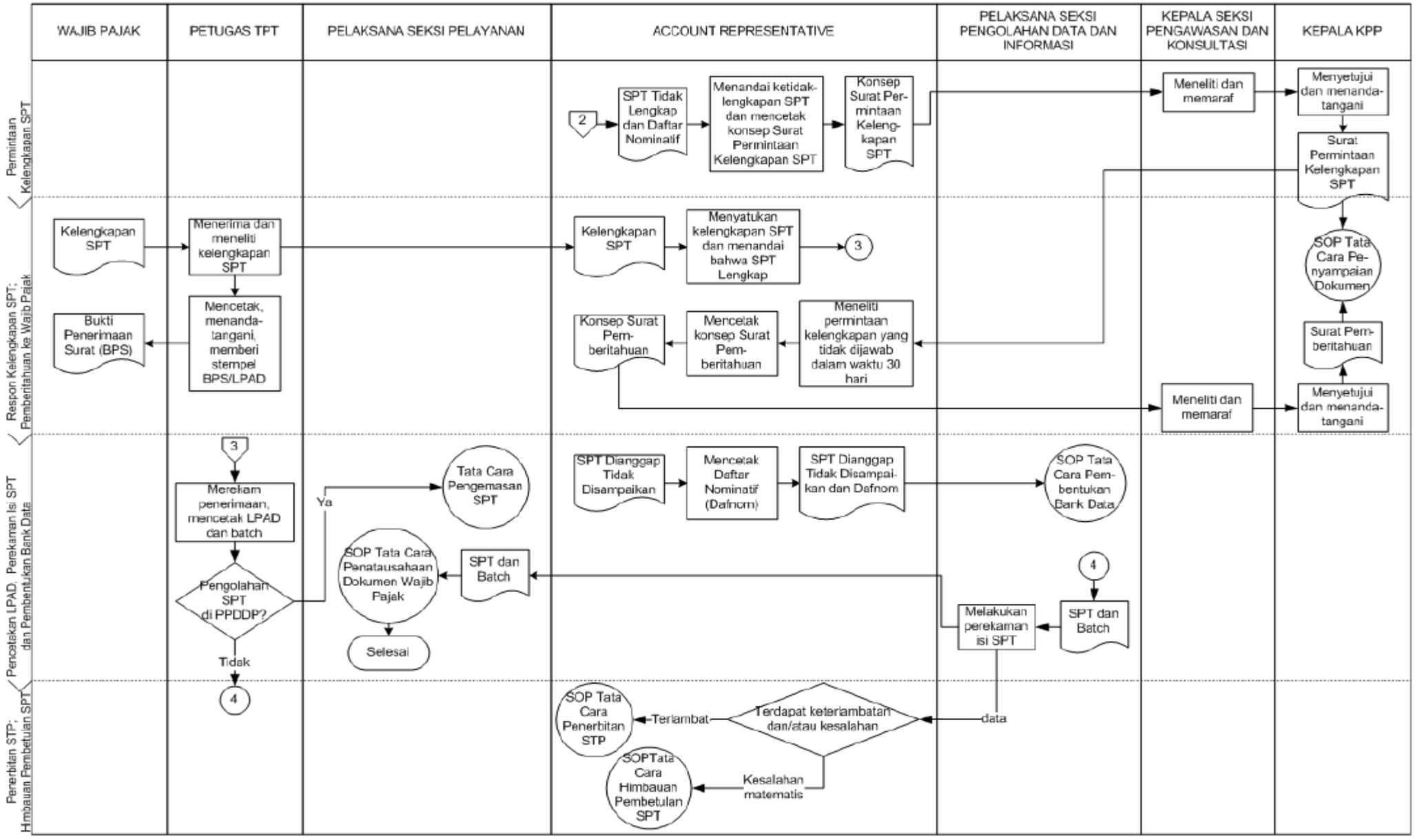

LAMPIRAN II.1
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

Petunjuk Pencetakan tanda Terima :

1. Ukuran :
   a. Lebar : 10,0 cm
   b. Panjang keseluruhan : 33,0 cm
      1) Panjang Lembar "Arsip" : 7,6 cm
      2) Panjang Lembar "Untuk Ditempel di Amplop" : 12,7 cm
      3) Panjang Lembar "Untuk Wajib Pajak : 12,7 cm

2. Penomoran :
   a. Nomor harus ditentukan terlebih dahulu (*Prenumbered*)
   b. Nomor terdiri dari 13 digit dengan format **aaa-bb-cccccccc**
      aaa : Kode KPP
      bb : Kode unit Penerimaan SPT di masing-masing KPP (TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box*)
      cccccccc : Nomor urut Tanda Terima disetiap unit penerimaan SPT.
   c. Contoh Penomoran Tanda Terima :
      Kode KPP : 315
      Kode Unit Penerima SPT 01 : TPT KPP
      02 : TPT KP2KP
      03 : Pojok Pajak
      04 : Mobil Pajak
      05 : Drop Box di Mall Y
      06 : Drop Box di Kawasan Perkantoran Z
      dst.

      Nomor Tanda Terima :

TPT KPP :	TPT KP2KP :	Pojok Pajak :
315-01-00000001	315-02-00000001	315-03-00000001
315-01-00000002	315-02-00000002	315-03-00000002
315-01-00000003	315-02-00000003	315-03-00000003
dst.	dst.	dst.

Mobil Pajak :	DroP Box di Mall Y :	Drop Box di Kawasan Perkantoran Z:
315-04-00000001	315-05-00000001	315-06-00000001
315-04-00000002	315-05-00000002	315-06-00000002
315-04-00000003	315-05-00000003	315-06-00000003
dst.	dst.	dst.

      Contoh Kode Unit Penerima SPT tersebut tidak mengikat, tapi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing KPP.

3. Tanda Terima harus di beri tanggal, ditandatangani oleh Petugas Penerima SPT dan dibubuhi stempel.

LAMPIRAN II.2
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS
PENERIMAAN SPT MELALUI TPT/POJOK PAJAK/MOBIL PAJAK/*DROP BOX*

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun....., di buat berita acara serah terima berkas :

Nama Berkas : SPT Tahunan
Tanggal di terima : .....
Unit *Drop Box* : ..... (Lokasi TPT/Pjok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box)
Nomor Tanda Terima : ..... s.d. .....
Nomor Tidak Terpakai : ..... s.d. .....

	KPP Penyelenggara (berkas)		KPP Lain (berkas)		Total (Berkas)	
	Badan	OP	Badan	OP	Badan	OP
SPT Nihil						
SPT Kurang Bayar						
SPT Lebih Bayar						
Total						

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya.

Petugas I,

.....
NIP.

Petugas II,

.....
NIP.

Kepala Seksi Pelayanan,

.....
NIP.

LAMPIRAN II.3
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KANTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN
Nomor : .....
Tanggal : .....

Nama :
Alamat :
N.P.W.P. :
No. P.K.P :

Jenis Pajak :
Ms/Thn Pajak :

TEMPAT PELAYANAN TERPADU	
Uraian	Prf/Tg
Surat diterima :	
1. langsung	.....
2. melalui pos	.....

Uraian		Prf/Tg
Diteruskan ke :		
1	Seksi :.....	.....
2	Diterima Seksi	.....
3	Selesai diproses	.....

Uraian	Prf/Tg
PENYIDIKAN	
1. diberitahukan ke penuntut umum	
2. Penyidikan	
3. Selesai disidik	
4. Disampaikan ke penuntut umum	
PENETAPAN	
1. STP	
2. SKPN	
3. SKPKB	
4. SKPKBT	
5. SKPLB	
RESTITUSI	
1. SKPKPP	
2. SPMKP	
PENGARSIPAN	
1. Dimasukkan ke induk berkas	
2. Diteruskan ke :.....	
3. Diterima kembali	

SEKSI TERKAIT	
Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :.....	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	
Diteruskan ke :	
1. Seksi :.....	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	
Diteruskan ke :	
1. Seksi :.....	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	

PENGELOLAAN SPT. Tahunan PPh/masa PPN	
Uraian	Prf/Tg
PENGOLAHAN SPT	
1. Dicatatpada 1Q-1	
2. Selesai di Edit	
3. Selesai direkam	
4. Dicatat pada 1Q-2	
PEMERIKSAAN	
6. Lengkap	
7. Sederhana	
7.1. Lapangan	
7.2 Kantor	

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon : Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nomor :

Nama :
Alamat :
N.P.W.P :
No.P.K.P :

Jenis Pajak :
Ms/Thn Pajak :

Petugas penerima,

NIP :

KP.PDIP.3.16-96

LAMPIRAN II.4
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

DAFTAR NOMINATIF PENGIRIMAN SPT TAHUNAN/e-SPT TAHUNAN
KPP ..... *(KPP Tujuan)*

No	Nomor Tanda Terima SPT	NPWP	Nama	Tahun Pajak	Tanggal Diterima SPT	Status (LB/KB/ Nihil)

.....,.....20.....
Kepala Kantor,

.....
NIP.

Kepala Seksi Pelayanan,

.....
NIP.

LAMPIRAN II.5
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

Jl. ..... Telp. .....
..... Fax. .....

Nomor : S- ....
Lampiran : .....(.....)
Hal : Pengiriman Tahunan/e-SPT Tahunan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....
Jl. .....
.....

Memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2010, bersama ini kami kirimkan SPT Tahunan di wilayah kerja Saudara yang kami terima melalui TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box* di wilayah kerja kami.

Adapun jenis berkas yang kami kirimkan adalah :

SPT Lebih Bayar : ..... buah
SPT Kurang Bayar : ..... buah
SPT Nihil : ..... buah
Total : ..... buah

Demikian untuk mendapat perhatian.

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

LAMPIRAN II.6.a
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

Jl. .....
.....

Telp. .....
Fax. .....

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770)

.....

Yth. .....
.....
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770) yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

a. ☐ 1770 (Induk SPT)

b. ☐ 1770-I hal. 1

c. ☐ 1770-I hal. 2

d. ☐ 1770-II

e. ☐ 1770-III

f. ☐ 1770-IV

2. Lampirang yang disyaratkan

a. ☐ SSP Pasal 29;

b. ☐ Neraca dan Laporan Rugi Laba;

c. ☐ Rekapitulasi peredaran bruto dan biaya bulanan;

d. ☐ Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai.

e. ☐ Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721 A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;

f. ☐ Surat Kuasa Khusus;

g. ☐ Surat keterangan kematian;

h. ☐ Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;

i. ☐ Penghitungan Kompensasi Kerugian;

j. ☐ Penghitungan Pajak Penghasilan terutang bagi WP kawin pisah harta atau suami istri yang memilih kewajiban perpajakan masing-masing;

k. ☐ Bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain/Ditanggung Pemerintah dan yang di bayar/di potong di luar negeri;

l. ☐ Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN)

3. Lampiran Khusus

☐ Lembar "Data Identitas Wajib Pajak".

4. Lain-lain

a. ☐ NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi;

b. ☐ SPT tidak ditandatangani;

c. ☐ Tahun Pajak tidak diisi;

d. ☐ Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir);

e. ☐ Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan/e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

LAMPIRAN II.6.b
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

Jl. .....
.....

Telp. .....
Fax. .....

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 S)

Yth. .....
.....
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 S) yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

a. ☐ 1770 S (Induk SPT)

b. ☐ 1770 S-I

c. ☐ 1770S-II

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ SSP Pasal 29;

b. ☐ Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721 A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;

c. ☐ Surat Kuasa Khusus;

d. ☐ Surat keterangan kematian;

e. ☐ Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;

f. ☐ Bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain/Ditanggung Pemerintah dan yang di bayar/di potong di luar negeri;

g. ☐ Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN)

3. Lampiran Khusus

☐ Lembar "Data Identitas Wajib Pajak".

4. Lain-lain

a. ☐ NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi;

b. ☐ SPT tidak ditandatangani;

c. ☐ Tahun Pajak tidak diisi;

d. ☐ Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir);

e. ☐ Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan/e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

LAMPIRAN II.6.c
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

Jl. .....
.....

Telp. .....
Fax. .....

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 SS)

.....

Yth. .....
.....
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 SS) yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku
a. ☐ 1770 SS (Induk SPT)

2. Lampiran yang disyaratkan
a. ☐ Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721 A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;

b. ☐ Surat Kuasa Khusus;

3. Lampiran Khusus
☐ Lembar "Data Identitas Wajib Pajak".

4. Lain-lain
a. ☐ NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi;

b. ☐ SPT tidak ditandatangani;

c. ☐ Tahun Pajak tidak diisi;

d. ☐ Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir);

e. ☐ Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan/e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

LAMPIRAN II.6.d
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

Jl. .....
.....

Telp. .....
Fax. .....

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan (1771)**

.....

Yth. .....
.....
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771) yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

a. ☐ 1771 (Induk SPT)

b. ☐ 1771 hal 2

c. ☐ 1771-I

d. ☐ 1771-II

e. ☐ 1771-III

f. ☐ 1771-IV

g. ☐ 1771-V

h. ☐ 1771-VI

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;

b. ☐ Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik;

c. ☐ SSP PPh Pasal 26 ayat (4);

d. ☐ Surat Kuasa Khusus;

3. Lampiran Khusus

a. ☐ **1A** : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;

b. ☐ **2A** : Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;

c. ☐ **3A, 3A-1 & A-2** : Penyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *Tax Haven Country*;

d. ☐ **4A** : Daftar Fasilitas Penanaman Modal;

e. ☐ **5A** : Daftar Cabang Utama Perusahaan;

f. ☐ **6A** : Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);

g. ☐ **7A** : Kredit Pajak Luar Negeri;

h. ☐ **8A-1/8A-2/8A-3/8A-5/8A-6** : Transkip kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan.

4. Lain-lain

a. ☐ NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi;

b. ☐ SPT tidak ditandatangani;

c. ☐ Tahun Pajak tidak diisi;

d. ☐ Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir);

e. ☐ Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan/e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

LAMPIRAN II.6.e
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

Jl. .....
.....

Telp. .....
Fax. .....

Nomor : .....
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan yang Menggunakan Mata Uang US Dollar (1771$)**

Yth. .....
.....
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771 $) yang kami terima pada tanggal ..... ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

a. ☐ 1771 (Induk SPT)

b. ☐ 1771/$ hal. 1

c. ☐ 1771-I/$

d. ☐ 1771-II/$

e. ☐ 1771-III/$

f. ☐ 1771-IV/$

g. ☐ 1771-V/$

h. ☐ 1771-VI/$

2. Lampiran yang disyaratkan

a. ☐ SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;

b. ☐ Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik;

c. ☐ SSP PPh Pasal 26 ayat (4);

d. ☐ Surat Kuasa Khusus;

3. Lampiran Khusus

a. ☐ **1B** : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;

b. ☐ **2B** : Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;

c. ☐ **3B, 3B-1 & B-2** : Penyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *Tax Haven Country*;

d. ☐ **4B** : Daftar Fasilitas Penanaman Modal;

e. ☐ **5B** : Daftar Cabang Utama Perusahaan;

f. ☐ **6B** : Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);

g. ☐ **7B** : Kredit Pajak Luar Negeri;

h. ☐ **8B-1/8B-2/8B-3/8B-5/8B-6** : Transkip kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan.

4. Lain-lain

a. ☐ NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi;

b. ☐ SPT tidak ditandatangani;

c. ☐ Tahun Pajak tidak diisi;

d. ☐ Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir);

e. ☐ Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan/e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal .....

LAMPIRAN II.7
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

Jl. .....
.....

Telp. .....
Fax. .....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan

.....

Yth. .....
.....
.....

Menunjuk surat kami terdahulu :
Nomor :
Tanggal :
Hal : **Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan**

Sampai saat ini kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang di minta belum kami terima.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (7) dan (7a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka SPT Tahunan/e-SPT tahunan Badan/Orang Pribadi*) yang telah Saudara sampaikan pada tanggal ....., **kami anggap tidak disampaikan**.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II.8
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

DAFTAR NOMINATIF SPT LENGKAP

No	Nomor Tanda Terima SPT	NPWP	Nama	Tahun Pajak	Tanggal Diterima SPT	Status (LB/KB/ Nihil)

.....,.....20.....
Petugas TPT, Peneliti,

....
NIP. NIP.

LAMPIRAN II.9
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

DAFTAR NOMINATIF SPT TIDAK LENGKAP

No	Nomor Tanda Terima SPT	NPWP	Nama	Tahun Pajak	Tanggal Diterima SPT	Status (LB/KB/ Nihil)

.....,.....20.....

Account Representative,

.....
NIP.

Peneliti,

.....
NIP.

LAMPIRAN II.10.a
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

LEMBAR PENELITIAN KETIDAKLENGKAPAN SPT TAHUNAN WP ORANG PRIBADI
FORMULIR DAN LAMPIRAN YANG TIDAK LENGKAP

NPWP :		NAMA :			
1770		1770 S		1770 SS	
FORMULIR					
☐	1770	☐	1770 S	☐	1770 SS
☐	1770-I hal. 1	☐	1770 S – I		
☐	1770-I hal. 2	☐	1770 S – II		
☐	1770-II				
☐	1770-III				
☐	1770-IV				
LAMPIRAN YANG DISYARATKAN					
☐	SSP Ps. 29 (*Jika SPT kurang bayar*)	☐	SSP Ps. 29 (Jika SPT kurang bayar)	☐	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain.
☐	Neraca dan Laporan Laba Rugi (*jika pembukuan*)	☐	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain.	☐	Surat Kuasa Khusus (jika SPT ditandatangani oleh kuasa WP)
☐	Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya (*jika menggunakan Norma*)	☐	Surat Kuasa Khusus (jika SPT ditandatangani oleh kuasa WP)		
☐	Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (*untuk WP Pengusaha Tertentu*)	☐	Surat keterangan kematian (jika SPT ditandatangani oleh Ahli Waris)		
☐	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain (*jika memiliki penghasilan sehubungan dg pekerjaan*)	☐	Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya (*Jika WP Mengisi Bagian F Angka 18.b*)		
☐	Surat Kuasa Khusus (*jika SPT ditandatangani oleh kuasa WP*)	☐	Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri		
☐	Surat keterangan kematian (*jika SPT ditandatangani oleh Ahli Waris*)	☐	Fotokopi tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri (TBPFLN) - (*jika ada*)		
☐	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya (*jika ada sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan dan penghasilan tidak teratur*)				
☐	Perhitungan Kompensasi Kerugian (*jika WP mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya*)				
☐	Penghitungan Pajak Penghasilan terutang (*bagi WP kawin pisah harta atau suami istri yang memilih kewajiban perpajakannya masing-masing*)				
☐	Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri (*jika ada*)				
☐	Fotokopi tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri (TBPFLN) - (*jika ada*)				
LAMPIRAN KHUSUS					
☐	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" (*jika terdapat perubahan identitas*)	☐	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" (*jika terdapat perubahan identitas*)	☐	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" (*jika terdapat perubahan identitas*)
LAIN-LAIN					
☐	NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi	☐	NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi	☐	NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi
☐	SPT tidak ditandatangani	☐	SPT tidak ditandatangani	☐	SPT tidak ditandatangani
☐	Tahun Pajak tidak diisi	☐	Tahun Pajak tidak diisi	☐	Tahun Pajak tidak diisi
☐	Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir)	☐	Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir)	☐	Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir)
☐	Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT)	☐	Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT)	☐	Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT)

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

Peneliti,

.....
NIP

LAMPIRAN II.10.b
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

LEMBAR PENELITIAN KETIDAKLENGKAPAN SPT TAHUNAN WP BADAN
FORMULIR DAN LAMPIRAN YANG TIDAK LENGKAP

NPWP :		NAMA :	
1771		1771 $	
FORMULIR			
☐	1771	☐	1771/$
☐	1771 hal. 2	☐	1771/$ hal. 2
☐	1771-I	☐	1771-I/$
☐	1771-II	☐	1771-II/$
☐	1771-III	☐	1771-III/$
☐	1771-IV	☐	1771-IV/$
☐	1771-V	☐	1771-V/$
☐	1771-VI	☐	1771-VI/$
LAMPIRAN YANG DISYARATKAN			
☐	SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29 (*Jika SPT kurang bayar*)	☐	SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29 (*Jika SPT kurang bayar*)
☐	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik	☐	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
☐	SSP PPh Pasal 26 ayat (4) (*Khusus BUT yang membayar setoran PPh Pasal 26 Ayat (4)*)	☐	SSP PPh Pasal 26 ayat (4) (*Khusus BUT yang membayar setoran PPh Pasal 26 Ayat (4)*)
☐	Surat Kuasa Khusus (*Jika dikuasakan*)	☐	Surat Kuasa Khusus (*Jika dikuasakan*)
LAMPIRAN KHUSUS			
☐	**1A** : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (*jika WP memiliki aktiva yang disusutkan atau diamortisasi*)	☐	**1B** : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (*jika WP memiliki aktiva yang disusutkan atau diamortisasi*)
☐	**2A** : Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (*jika WP mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal*)	☐	**2B** : Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (*jika WP mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal*)
☐	**3A,3A-1 & 3A-2** : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara*Tax haven Country* (*jika WP mengisi induk SPT 1771 bagian G angka 16.a*)	☐	**3B,3B-1 & 3B-2** : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara*Tax haven Country* (*jika WP mengisi induk SPT 1771 bagian G angka 16.a*)
☐	**4A** : Daftar Fasilitas Penanaman Modal (*jika WP memperoleh fasilitas penanaman modal*)	☐	**4B** : Daftar Fasilitas Penanaman Modal (*jika WP memperoleh fasilitas penanaman modal*)
☐	**5A** : Daftar Cabang Utama Perusahaan (*jika WP mempunyai kantor cabang atau tempat-tempat usaha diluar kantor pusatnya*)	☐	**5B** : Daftar Cabang Utama Perusahaan (*jika WP mempunyai kantor cabang atau tempat-tempat usaha diluar kantor pusatnya*)
☐ ☐	**6A** : Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) (*jika terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh BUT*) **7A** : Kredit Pajak Luar Negeri (*jika WP memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak di luar negeri*)	☐ ☐	**6B** : Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) (*jika terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh BUT*) **7B** : Kredit Pajak Luar Negeri (*jika WP memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak di luar negeri*)
☐	**8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6** : Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan (*wajib diisi oleh WP, pilih salah satu formulir sesuai dengan jenis usahanya*)	☐	**8B-1/8B-2/8B-3/8B-4/8B-5/8B-6** : Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan (*wajib diisi oleh WP, pilih salah satu formulir sesuai dengan jenis usahanya*)
LAIN-LAIN			
☐	NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi	☐	NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi
☐	SPT tidak ditandatangani	☐	SPT tidak ditandatangani
☐	Tahun Pajak tidak diisi	☐	Tahun Pajak tidak diisi
☐	Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir)	☐	Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir)
☐	Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT)	☐	Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT)

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

Peneliti,

.....
NIP

LAMPIRAN II.11
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

DAFTAR NOMINATIF SPT YANG DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

No	Nomor Tanda Terima SPT	NPWP	Nama	Tahun Pajak	Tanggal Diterima SPT	Status (LB/KB/ Nihil)

.....,.....20.....

Pelaksana Seksi PDI,

Account Representative,

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN II.12
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

DAFTAR NOMINATIF PENGIRIMAN SPT WAJIB PAJAK SENDIRI

No	Nomor Tanda Terima SPT	NPWP	Nama	Tahun Pajak	Tanggal Diterima SPT	Status (LB/KB/ Nihil)

.....,.....20.....

Peneliti Kelengkapan SPT,

.....
NIP.

Petugas Perekaman
Tanda Terima SPT,

.....
NIP.

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

TATA CARA PEREKAMAN SPT TAHUNAN
(DALAM BENTUK KERTAS)

1. Sebelum melakukan perekaman, Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi harus membuat Transikrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan format sebagaimana terdapat pada Lampiran II.1

   (SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2009 tidak perlu dibuatkan Transkip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan karena Wajib Pajak Badan wajib membuatnya sendiri).

2. Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak hanya di buat untuk SPT Tahunan yang wajib melampirkan Laporan Keuangan.

3. Setelah SPT Tahunan beserta Register Harian diterima dan dicocokkan, Pelaksana Seksi PDI membuat Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak dengan cara mengutip data dari Neraca dan Laporan Laba/Rugi ke Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak sesuai dengan pengelompokan yang telah ditentukan dalam formulir tersebut **tanpa mengubah nilai** yang dilaporkan Wajib Pajak.

4. Pelaksana Seksi PDI merekam elemen-elemen SPT sesuai dengan menu perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana di atur pada :
   a. Lampiran III.2 untuk SPT PPh WP Orang Pribadi formulir 1770
   b. Lampiran III.3 untuk SPT PPh WP Orang Pribadi formulir 1770 S
   c. Lampiran III.4 untuk SPT PPh WP orang Pribadi formulir 1770 SS
   d. Lampiran III.5 untuk SPT PPh WP Badan formulir 1771
   e. Lampiran III.6 untuk SPT PPh WP Badan formulir 1771 $
   f. Lampiran III.7 Petunjuk Perekaman SPT Tahunan pada Tempat Pelayanan Terpadu
   g. Lampiran III.8 Lembar Penelitian dengan komputer.

LAMPIRAN III.1
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

TRANSKRIP
KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI
LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
NAMA WAJIB PAJAK : .....
TAHUN PAJAK : .....

I. ELEMEN DARI NERACA

1	PIUTANG USAHA		5	UTANG JANGKA PENDEK	
2	AKTIVA LANCAR SELAIN PIUTANG USAHA		6	UTANG JANGKA PANJANG	
3	AKTIVA TETAP		7	MODAL	
4	AKTIVA LAINNYA		8	LABA ATAU RUGI TAHUN BERJALAN	
	JUMLAH			JUMLAH	

II. ELEMEN DARI LAPORAN RUGI / LABA

1.	PEREDARAN USAHA	
2.	PERSEDIAAN AWAL	
3.	PEMBELIAN / PRODUKSI	
4.	PERSEDIAAN AKHIR	
5.	HARGA POKOK PENJUALAN	
6.	LABA BRUTO USAHA	
7.	PENGHASILAN DI LUAR USAHA	
8.	BIAYA OPERASIONAL	
	A. GAJI, UPAH DSB	
	B. PENYUSUTAN	
	C. AMORTISASI	
	D. BUNGA	
	E. SEWA	
	F. ROYALTI	
	G. KERUGIAN SELISIH KURS	
	H. LAIN-LAIN	
	JUMLAH OPERASIONAL	
9.	LABA ATAU RUGI TAHUN BERJALAN	

TRANSKIP	PADA TANGGAL	NAMA	TANDA TANGAN
DIBUAT			
DIREKAM			
DITELAAH			

D.1.1.22.01

PETUNJUK PENGISIAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI
LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

I ELEMEN NERACA

1. Piutang usaha, diisi sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih.
2. Aktiva lancar selain piutang usaha, diisi dengan penjumlahan dari pos-pos neraca antara lain kas, bak, surat-surat berharga, deposito jangka pendek, persediaan, pembayaran uang muka, pembayaran pajak di muka, piutang lain-lain, biaya di bayar di muka, pembayaran pajak di muka.
3. Aktiva tetap, diisi dengan penjumlahan seluruh pos aktiva tetap dikurangi dengan penyusutan (nilai buku aktiva).
4. Aktiva lainnya, diisi dengan penjumlahan dari pos-pos yang tidak termasuk dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tetap, misalnya penanaman dalam surat berharga, *goodwill*, kerugian kurs yang ditangguhkan, selisih penilaian aktiva tetap, disagio saham, piutang tidak lancar, piutang kepada pemegang saham, uang muka pada cabang, dan harta dalam dana khusus.
5. Utang jangka pendek, diisi dengan penjumlahan pos-pos utang yang akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun / 1 (satu) siklus operasi normal, misalnya pinjaman bank, utang usaha/utang dagang dan biaya yang masih harus di bayar, uang muka penjualan, utang pajak, utang deviden, pendapatan yang ditangguhkan, kewajiban kontinjen, utang afiliasi, pinjaman yang akan jatuh tempo dalam tahun yang bersangkutan, dan sebagainya.
6. Utang jangka panjang, diisi dengan penjumlahan dari pos-pos utang yang jatuh temponya tidak dalam tahun yang bersangkutan, misalnya utang obligasi, wesel bayar, pajak penghasilan yang ditangguhkan, kewajiban lease, kewajiban pensiun, utang kepada pihak ketiga lainnya, dan sebagainya.
7. Modal, diisi dengan penjumlahan dari pos modal atau yang disamakan dengan modal, antara lain modal disetor, agio saham, laba atau rugi sampai dengan tahun lalu, dan sebagainya.
8. Rugi atau laba tahun berjalan, diisi dengan jumlah rugi atau laba untuk tahun yang bersangkutan. Dalam hal laba disajikan oleh Wajib Pajak pada sebelah kredit maka laba tersebut dipisahkan dengan pos modal. Dalam hal rugi disajikan oleh Wajib Pajak pada sebelah debet, maka angkanya dialihkan ke dalam transkrip ini di sebelah kanan dan mengurangi pos modal.

II. ELEMEN LAPORAN RUGI LABA

1. Peredaran Usaha, diisi dengan penjumlahan dari seluruh sumber penghasilan usaha Wajib Pajak, baik yang berasal dari peredara usaha, jasa, dagang, industri, maupun peredaran usaha lainnya. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan, diisi dengan jumlah penghasilan untuk tahun yang bersangkutan.
2. Persediaan Awal, bagi Wajib Pajak yang bidang usahanya industri diisi dengan jumlah seluruh persediaan barang jadi pada awal tahun yang bersangkutan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, diisi dengan jumlah seluruh jenis persediaan barang dagangan pada awal tahun yang bersangkutan.
3. Pembelian/Produksi, bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, diisi dengan penjumlahan seluruh pembelian barang dagangan selama tahun yang bersangkutan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang bidang usahanya industri diisi dengan harga pokok produksi.
4. Persediaan Akhir, bagi Wajib Pajak yang bidang usahanya industri diisi dengan penjumlahan seluruh jenis persediaan barang jadi, pada akhir tahun yang bersangkutan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan diisi dengan penjumlahan seluruh persediaan barang dagangan pada akhir tahun yang bersangkutan.
5. Harga Pokok Penjualan, diisi dengan perhitungan sebagai berikut :
   a. Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha industri, formulasinya adalah sebagai berikut :
      Persediaan awal barang dagangan + Harga Pokok Produksi - Persediaan akhir barang dagangan.
   b. Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, formulasinya adalah sebagai berikut :
      Persediaan awal barang jadi + Pembelian - Persediaan akhir barang jadi.
   c. Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa dan lainnya, tidak ada unsur harga pokok penjualan**.**
6. Laba Bruto Usaha, diisi dengan peredaran usaha dikurangi dengan harga pokok, yang diformulasikan sebagai berikut :
   Peredaran Usaha - Harga Pokok Penjualan = Laba Bruto Usaha
7. Penghasilan Di Luar usaha, diisi dengan penjumlahan seluruh sumber penghasilan yang berasal dari luar usaha, misalnya bunga, deviden, **royalti**, sewa, keuntungan dari penjumlahan harta, dan sebagainya.
8. Biaya Operasional, diisi dengan jumlah biaya yang telah dikelompokkan sebagaimana tercantum dalam huruf A s.d. H. Terhadap jenis biaya lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok A s.d. G akan ditampung dalam kelompok H.
9. Laba atau Rugi Tahun Berjalan, diisi dengan hasil penjumlahan antara laba bruto usaha (angka 6) ditambah penghasilan di luar usaha (angka 7) dikurangi dengan biaya operasional (angka 8), dengan formulasi sebagai berikut :
   Laba Bruto Usaha + Penghasilan Di Luar Usaha - Biaya Operasional = Laba atau Rugi Tahun Berjalan

CATATAN PENTING

1. Laporang keuangan yang diinterprestasikan ke dalam transkrip adalah Laporan Keuangan yang dilampirkan oleh Wajib Pajak.
2. Transkip di buat oleh Pelaksana pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3. Transkip harus ditandatangani oleh petugas yang membuat transkrip, petugas yang merekam dan ditelaah oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
4. Semua elemen berisi jumlah Rupiah penuh tanpa sen.

LAMPIRAN III.2
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	**INDUK SPT FORMULIR 1770**	
1.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
2.	TAHUN BUKU	Pada kotak sudut kanan atas	BB-TT s.d.BB-TT
3.	NORMA/PEMBUKUAN	Pada kotak sudut kanan atas	1 : Norma 2 : Pembukuan
4.	PEMBETULAN KE-...	Pada kotak sudut kanan atas	minimal 0
	IDENTITAS		
5.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
6.	NAMA WP, JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS, NO. TELEPON/FAKSIMILI DAN PERUBAHAN DATA	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
	A. PENGHASILAN NETO	**KOLOM A.**	
7.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS	Kolom A.1.	Minimal 0
8.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	Kolom A.2.	Minimal 0
9.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA	Kolom A.3.	Minimal 0
10.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI	Kolom A.4.	Minimal 0
11.	JUMLAH PENGHASILAN NETO	Kolom A.5.	Minimal 0, (A.1. + A.2. + A.3. + A.4.)
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	Kolom A.6.	Minimal 0
13.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	Kolom A.7.	Minimal 0, (A.5. - A.6.)
14.	**B. PENGHASILAN KENA PAJAK**	**KOLOM B.**	
15.	KOMPENSASI KERUGIAN	Kolom B.8.	Minimal 0 Tidak boleh lebih besar dari Kolom A.7.
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN	Kolom B.9.	Minimal 0, (A.7. -A.8.)
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B. 10.	Diisi jumlah tanggungan pada : TK = tidak kawin, K = kawin K/I = kawin istri berpenghasilan, PH = kawin pisah harta dan penghasilan, HB = kawin, hidup berpisah
18.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.10.	Minimal 0, sesuai dengan perhitungan PTKP
19.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom B.11.	Minimal 0, (B.9 - B.10)
	C. PPh TERUTANG	**KOLOM C.**	
20.	PPh TERUTANG	Kolom C.12	Minimal 0, (Tarif Ps. 17 X B.11)
21.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	Kolom C. 13.	Minimal 0
22.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom C.14.	Minimal 0, (C.12. + C.13.)
	D. KREDIT PAJAK	**KOLOM D**	
23.	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	Kolom D.15	Minimal 0
24.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	Kolom D.16	Minimal 0, (C.14 - D.15) atau (D.15 - C.14)

25.	KODE PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	Kolom D.16.	Otomatis berdasarkan perhitungan KB, LB, N
	PPH YANG DIBAYAR SENDIRI	Kolom D.17.	
26.	PPh PASAL 25 ayat (1) BULANAN	Kolom D.17.a.	Minimal 0
27.	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	Kolom D.17.b.	Minimal 0
28.	FISKAL LUAR NEGERI	Kolom D.17.c	Minimal 0
29.	JUMLAH KREDIT PAJAK	Jumlah Kolom D.18.	Minimal 0, (D.17.a. + D.17.b. + D.17.c.)
	E. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	**KOLOM E**	
30.	PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E. 19.	Minimal 0, (Jumlah kolom D.16 - D.18) atau (Jumlah kolom D.18 - D.16)
31.	KODE PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.19. (KOTAK)	Otomatis berdasarkan perhitungan
32.	TANGGAL PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.19. (dari SSP PPh PASAL 29)	Date, dari SSP PPh Pasal 29 jika KB
33.	JUMLAH PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.19. (dari SSP PPh PASAL 29)	Minimal 0, dari SSP PPh Pasal 29, jika KB
34.	PERMOHONAN : PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 19.b MOHON :	Kolom E.20.	Apabila LB diisi : direstitusikan = 1 diperhitungkan dengan utang pajak =2 Dikembalikan dengan SKPP Pasal 17 C (WP Patuh) = 3 Dikembalikan dengan SKPP Pasal 17 D (WP Tertentu) = 4
	F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	**KOLOM F.**	
35.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	Kolom F.	Minimal 0
36.	KODE ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUT	Kolom F.	Diisi : 1 = 1/12 JUMLAH PADA ANGKA 16.a. 2 = PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
	G. LAMPIRAN	**KOLOM G.**	
37.	LAMPIRAN	Kolom G.	Diisi : 1 = lengkap 0 = tidak lengkap
	PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN	**LAMPIRAN - I FORMULIR 1770-I**	
	BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)	**BAGIAN A.**	
38.	DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK :....(KODE)		Diisi : 1 = diaudit 0 = tidak diaudit
39.	DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK :....(NAMA AKUNTAN PUBLIK)		Karakter
40.	OPINI AKUNTAN PUBLIK		Diisi : 1 = wajar tanpa pengecualian 2 = wajar dengan pengecualian 3 = tidak wajar 4 = tidak ada opini
	NAMA DAN NPWP AKUNTAN PUBLIK, NAMA DAN NPWP KANTOR AKUNTANPUBLIK, NAMA DAN NPWP KONSULTAN PAJAK SERTA NAMA DAN NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK		
	1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL		
41.	PEREDARAN USAHA	Kolom 1.a.	Minimal 0
42.	HARGA POKOK PENJUALAN	Kolom 1.b.	Minimal 0
43.	LABA / RUGI BRUTO USAHA	Kolom 1.c.	All value, (1.a. -1.b.)
44.	BIAYA USAHA	Kolom 1.d.	Minimal 0
45.	PENGHASILAN NETO (c-d)	Kolom 1.e.	All value, (1.c. -1.d.)

	2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF		
46.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	Kolom 2.a.	Minimal 0
47.	PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA, YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	Kolom 2.b.	Minimal 0
48.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN	Kolom 2.c.	Minimal 0
49.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN	Kolom 2.d.	Minimal 0
50.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	Kolom 2.e.	Minimal 0
51.	PAJAK PENGHASILAN	Kolom 2.f.	Minimal 0
52.	GAJI YANG DIBAYAR KEPADA PEMILIK/ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNNYA	Kolom 2.g.	Minimal 0
53.	SANKSI ADMINISTRASI	Kolom 2.h.	Minimal 0
54.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	Kolom 2.i.	Minimal 0
55.	BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	Kolom 2.j.	Minimal 0
56.	PENYESUAI FISKAL POSITIF LAINNYA	Kolom 2.k.	Minimal 0
57.	JUMLAH a. s.d. k	Kolom 2.l. jumlah a. s.d. k.	Minimal 0
	3. PENYESUAI FISKAL NEGATIF		
58.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	Kolom 3.a.	Minimal 0
59.	SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL	Kolom 3.b	Minimal 0
60.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LANNYA	Kolom 3.c.	Minimal 0
61.	JUMLAH a. s.d. c.	Kolom 1 Jumlah a. s.d. c.	Minimal 0, (3.a. + 3.b. + 3.c.)
62.	JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)	Kolom 4	All value, (1.e. + 21 - 3.d)
	. PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO **. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN** **. PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA**	**HALAMAN 2 LAMPIRAN - I FORMULIR 1770 - I**	
	BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)	**BAGIAN : B**	
63.	PEREDARAN USAHA DAGANG	Kolom B.1.(3).	Minimal 0
64.	% NORMA USAHA DAGANG	Kolom B.1.(4).	Minimal 0,00
65.	PENGHASILAN NETO USAHA DAGANG	Kolom B.1.(5).	Minimal 0
66.	PEREDARAN USAHA INDUSTRI	Kolom B.2.(3).	Minimal 0
67.	% NORMA USAHA INDUSTRI	Kolom B.2.(4).	Minimal 0,00
68.	PENGHASILAN NETO USAHA INDUSTRI	Kolom B.2.(5).	Minimal 0
69.	PEREDARAN USAHA JASA	Kolom B.3.(3).	Minimal 0
70	% NORMA USAHA JASA	Kolom B.3.(4).	Minimal 0,00
71.	PENGHASILAN NETO USAHA JASA	Kolom B.3.(5).	Minimal 0
72.	PEREDARAN USAHA PEKERJAAN BEBAS	Kolom B.4.(3).	Minimal 0
73.	% NORMA USAHA PEKERJAAN BEBAS	Kolom B.4.(4).	Minimal 0,00
74.	PENGHASILAN NETO USAHA PEKERJAAN BEBAS	Kolom B.4.(5).	Minimal 0
75.	PEREDARAN USAHA LAINNYA	Kolom B.5.(3).	Minimal 0
76.	% NORMA USAHA LAINNYA	Kolom B.5.(4).	Minimal 0,00
77.	PENGHASILAN NETO USAHA LAINNYA	Kolom B.5.(5).	Minimal 0
78.	JUMLAH BAGIAN B : PEREDARAN USAHA	Kolom B.(3). JUMLAH	Minimal 0, (B.1.(3) + B.2.(3) + B.3.(3) + B.4.(3) + B.5.(3)
79.	JUMLAH BAGIAN B : PENGHASILAN NETO	Kolom B.(5). JUMLAH	Minimal 0, (B.1.(5) + B.2.(5) + B.3.(5) + B.4.(5) + B.5.(5)

	BAGIAN C. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	**BAGIAN C**	
80.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	Kolom C.1.(2).	
81.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom C.1.(3).	Minimal 0
82.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA	Kolom C.1.(4).	Minimal 0
83.	PENGHASILAN NETO	Kolom C.1.(5).	Minimal 0
84.	JUMLAH BAGIAN C : PENGHASILAN NETO	Kolom B.(5). JUMLAH	Minimal 0, (B.1.(5) + B.2.(5) + B.3.(5) + B.4.(5) + B.5.(5)
	BAGIAN D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)	**BAGIAN D**	
85.	JUMLAH PENGHASILAN BUNGA	Kolom D.1.(3).	All values
86.	JUMLAH PENGHASILAN ROYALTI	Kolom D.2.(3).	All values
87.	JUMLAH PENGHASILAN SEWA	Kolom D.3.(3).	All values
88.	JUMLAH PENGHASILAN PENGHARGAAN DAN HADIAH	Kolom D.4.(3).	All values
89.	JUMLAH PENGHASILAN KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA	Kolom D.5.(3).	All values
90.	JUMLAH PENGHASILAN LAINNYA	Kolom D.6.(3).	All values
91.	JUMLAH BAGIAN D	Kolom D.(3). JUMLAH	All value, jumlah c.1. s.d. c.6.
	DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DILUAR NEGERI DAN PPh	**LAMPIRAN - II FORMULIR 1770 - II**	
	BAGIAN A. DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DILUAR NEGERI DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	**BAGIAN A.**	
92.	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	Kolom A : Kolom (7). JUMLAH BAGIAN A	Minimal 0
	. **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL,** . **PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK** . **PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH**	**LAMPIRAN - III FORMULIR 1770 - III**	
	BAGIAN A. PENGHASILAN DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	**BAGIAN A.**	
	I. DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	**BAGIAN A.I.**	
93.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) / PENGHASILAN BRUTO BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	Kolom A.I.1.(3).	Minimal 0
94.	PPh TERUTANG BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	Kolom A.I.1.(4).	Minimal 0
95.	DPP / PENGHASILAN BRUTO BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	Kolom A.I.2.(3).	Minimal 0
96.	PPh TERUTANG BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	Kolom A.I.2.(4).	Minimal 0
97.	DPP / PENGHASILAN BRUTO NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	Kolom A.I.3.(3).	Minimal 0
98.	PPh TERUTANG NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	Kolom A.I.3.(4).	Minimal 0
99.	DPP / PENGHASILAN BRUTO HADIAH UNDIAN	Kolom A.I.4.(3).	Minimal 0
100.	PPh TERUTANG HADIAH UNDIAN	Kolom A.I.4.(4).	Minimal 0
101.	DPP / PENGHASILAN BRUTO PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	Kolom A.I.5.(3).	Minimal 0
102.	PPh TERUTANG PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	Kolom A.I.5.(4).	Minimal 0
103.	DPP / PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	Kolom A.I.6.(3).	Minimal 0
104.	PPh TERUTANG HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	Kolom A.I.6.(4).	Minimal 0
105.	DPP / PENGHASILAN BRUTO NILAI PENGALIHAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	Kolom A.I.7.(3).	Minimal 0
106.	PPh TERUTANG NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	Kolom A.I.7.(4).	Minimal 0

107.	DPP / PENGHASILAN BRUTO NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH	Kolom A.I.8.(3).	Minimal 0
108.	PPh TERUTANG NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH	Kolom A.I.8.(4).	Minimal 0
109.	DPP / PENGHASILAN BRUTO SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	Kolom A.I.9.(3).	Minimal 0
110.	PPh TERUTANG SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	Kolom A.I.9.(4).	Minimal 0
111.	DPP / PENGHASILAN BRUTO USAHA JASA KONSTRUKSI	Kolom A.I.10.(3).	Minimal 0
112.	PPh TERUTANG USAHA JASA KONSTRUKSI	Kolom A.I.10.(4).	Minimal 0
113.	DPP / PENGHASILAN BRUTO PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	Kolom A.I.11a.(3).	Minimal 0
114.	PPh TERUTANG PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	Kolom A.I.11a.(4).	Minimal 0
115.	DPP BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI	Kolom A.I.12.(3).	Minimal 0
116.	PPh TERUTANG BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI	Kolom A.I.12.(4).	Minimal 0
117.	DPP DEVIDEN	Kolom A.I.14.a.(3).	Minimal 0
118.	PPh TERUTANG DIVIDEN	Kolom A.I.14.a.(4).	Minimal 0
119.	DPP / PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	Kolom A.I.15.a.(3).	Minimal 0
120.	PPh TERUTANG PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA	Kolom A.I.15.a.(4).	Minimal 0
121.	DPP PENGHASILAN LAINNYA	Kolom A.I.16.a.(3).	Minimal 0
122.	PPh TERUTANG PENGHASILAN LAIN	Kolom A.I.16.a.(4).	Minimal 0
123.	JUMLAH PPh TERUTANG	Kolom A.I.(4). JUMLAH	Minimal 0
	BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	**BAGIAN B**	
124.	PENGHASILAN BRUTO BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	Kolom B.1.(3).	Minimal 0
125.	PENGHASILAN BRUTO WARISAN	Kolom B.2.(3).	Minimal 0
126.	PENGHASILAN BRUTO BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	Kolom B.3.(3).	Minimal 0
127.	PENGHASILAN BRUTO KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	Kolom B.4.(3).	Minimal 0
128.	BEASISWA	Kolom B.5.(3).	Minimal 0
129.	PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	Kolom B.6.(3).	Minimal 0
130.	JUMLAH BAGIAN B	Kolom B.(3). JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Minimal 0
	BAGIAN C. PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	**BAGIAN C**	
131.	PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	rupiah	Minimal 0
	. HARTA PADA AKHIR TAHUN . KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN . DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA	**LAMPIRAN - IV FORMULIR 1770 - IV**	
	BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN	**BAGIAN A**	
132.	JUMLAH HARGA PEROLEHAN HARTA	JUMLAH Kolom BAGIAN A.(5)	Minimal 0
	BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN	**BAGIAN B**	
133.	JUMLAH KEWAJIBAN	JUMLAH kolom BAGIAN B.(5)	Minimal 0
	DAFTAR		
	BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA	**BAGIAN C**	

134	NAMA ANGGOTA KELUARGA	BAGIAN : C. kolom (2)	Karakter
135	TANGGAL LAHIR	BAGIAN : C. kolom (3)	DD-MM-YY
136	HUBUNGAN KELUARGA	BAGIAN : C. kolom (4)	10 : Istri, 20 : Suami, 30 : Anggota Keluarga Sedarah, 31 : Anak Kandung, 32 : Ayah, 33 : Ibu, 40 : Semenda, 41 : Mertua, 42 : Anak Tiri, 50 : Anak Angkat
137	PEKERJAAN	BAGIAN : C. kolom (5)	Karakter

PEREKAMAN DATA LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh	**LAMPIRAN - II FORMULIR 1770 - II**	
	BAGIAN A. DAFTAR PEMOTONG / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	**BAGIAN A.**	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
138.	NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	BAGIAN : A. Kolom (2)	Karakter
139.	NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	BAGIAN : A. Kolom (3)	999999999-999.999
140.	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	BAGIAN : A. Kolom (4) dan (5)	Karakter dan Date
141.	PPh PASAL 21 / PASA 22 / PASAL 23 / PASAL 24/ YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	BAGIAN : A. Kolom (6)	Karakter
142.	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT	BAGIAN : A. Kolom (7)	Minimal 0
	. HARTA PADA AKHIR TAHUN . KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN . DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA	**LAMPIRAN - IV FORMULIR 1770 - IV**	
	BAGIAN A : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN	**BAGIAN A**	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
143.	JENIS HARTA	BAGIAN : A. Kolom (2)	Karakter
144.	TAHUN PEROLEHAN	BAGIAN : A. Kolom (3)	TTTT
145.	HARGA PEROLEHAN	BAGIAN : A. Kolom (4)	Minimal 0
146.	KETERANGAN	BAGIAN : A. Kolom (5)	Karakter
	BAGIAN B. DAFTAR KEWAJIBAN / UTANG PADA AKHIR TAHUN	**BAGIAN B.**	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
147.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	Kolom B. (2)	Karakter
148.	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	Kolom B. (3)	Karakter
149.	TAHUN PEMINJAMAN	Kolom B. (4)	TTTT
150.	JUMLAH PINJAMAN	Kolom B. (5)	Minimal 0

LAMPIRAN III.3
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA, DALAM NEGERI LAINNYA, YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : **. DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;** **. DALAM NEGERI LAINNYA;** **. YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**	**INDUK SPT FORMULIR 1770 S**	
1.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
2.	PEMBETULAN KE-...	Pada kotak sudut kanan atas	Minimal 0
	PETUNJUK/PERHATIAN		
	IDENTITAS		
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.9999
4.	NAMA WP, PEKERJAAN, NO. TELEPON & NO. FAKS, KLU	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
5.	PERUBAHAN DATA	Wajib Pajak	
	A. PENGHASILAN NETO	**KOLOM A**	
6.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	Kolom A.1.	Minimal 0
7.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA	Kolom A.2.	Minimal 0
8.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI	Kolom A.3.	Minimal 0
9.	JUMLAH PENGHASILAN NETO	Kolom A.4.	All values, (A.1. + A.2. + A.3)
10.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	Kolom A.5.	Minimal 0
11.			
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	Kolom A.6.	All values
	B. PENGHASILAN KENA PAJAK	**KOLOM B**	
13.	STATUS KELUARGA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.7. (TANDA PADA KOTAK)	Diisi jumlah tanggungan pada : TK = tidak kawin, K = kawin, K = kawin isteri berpenghasilan Ph = kawin pisah harta dan penghasilan, HB = kawin, hidup berpisah.
14.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.7.	Minimal 0, sesuai dengan perhitungan PTKP
15.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom B.8.	Minimal 0, (A.6. - B.7.)
	C. PPh TERUTANG	**KOLOM C**	
16.	PPh TERUTANG	Kolom C.9.	Minimal 0, (Tarif Ps.17 X B.8.)
17.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	Kolom C. 10.	Minimal 0
18.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom C.11.	Minimal 0, (C.9. + C.10.)
	D. KREDIT PAJAK	**KOLOM D**	
19.	PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI	Kolom D.12.	Minimal 0
20.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI atau PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	Kolom D.13.	Otomatis dari sistem (C.11 - D.12.) atau (D.12. - C.11.)

21.	KODE PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI atau PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	Kolom D.13. (Kotak)	Otomatis dari sistem 0, jika : C.11 = D.12 1, jika : C.11 > D.12 2, jika : C.11 < D.12
22.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	Kolom D.14.	
23.	PPh PASAL 25	Kolom D.14.a.	Minimal 0
24.	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	Kolom D.14.b.	Minimal 0
25.	FISKAL LUAR NEGERI	Kolom D.14.c.	Minimal 0
26.	JUMLAH KREDIT PAJAK	Jumlah Kolom D.15.	Minimal 0, (D.14.a. + D.14.b. + D.14.c.)
	E. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	**KOLOM E**	
27.	PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.16.	Otomatis dari sistem (selisih D.13 dan D.15)
28.	KODE PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.16. (KOTAK)	Otomatis dari sistem
29.	TANGGAL PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.16. (dari SSP PPh PASAL 29)	Date, dari SSP PPh Pasal 29, jika KB
30.	JUMLAH PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.16. (dari SSP PPh PASAL 29)	Minimal 0, dari SSP PPh Pasal 29, jika KB
	PERMOHONAN		
31.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 16.b MOHON :	Kolom E.	Diisi apabila LB : 1 = direstitusikan 2 = diperhitungkan dengan utang pajak Dikembalikan dengan SKPP Pasal 17 C (WP Patuh) = 3 Dikembalikan dengan SKPP Pasal 17 D (WP Tertentu) = 4
	F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	**KOLOM G.**	
32.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	Kolom G.18	Minimal 0
33.	KODE ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUT	Kolom G.18	Diisi : 1 = 1/12 JUMLAH PADA ANGKA 13. 2 = PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
	G. LAMPIRAN		
31.	LAMPIRAN	Kolom G.	Diisi : 1 = lengkap 2 = tidak lengkap
	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LANNYA; PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK; DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	**LAMPIRAN - I FORMULIR 1770 S**	
	BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)	**BAGIAN : A**	
34.	JUMLAH PENGHASILAN BUNGA	Kolom A.1.(3).	Minimal 0
35.	JUMLAH PENGHASILAN ROYALTI	Kolom A.3.(3).	Minimal 0
36.	JUMLAH PENGHASILAN SEWA	Kolom A.3.(3).	Minimal 0
37.	JUMLAH PENGHASILAN PENGHARGAAN DAN HADIAH	Kolom A.4.(3).	Minimal 0
38.	JUMLAH PENGHASILAN KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA	Kolom A.5.(3).	Minimal 0
39.	JUMLAH PENGHASILAN LANNYA	Kolom A.6.(3).	Minimal 0
40.	JUMLAH BAGIAN A	Kolom A.(3). JBA	Minimal 0, penjumlahan A.1 s.d. A.6
	BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	**BAGIAN : B**	
41.	JUMLAH PENGHASILAN BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	Kolom B.1.(3).	Minimal 0
42.	JUMLAH PENGHASILAN WARISAN	Kolom B.2.(3).	Minimal 0
43.	JUMLAH PENGHASILAN BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	Kolom B.3.(3).	Minimal 0

44.	JUMLAH PENGHASILAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	Kolom B.4.(3).	Minimal 0
45.	BEASISWA	Kolom B.5.(3)	Minimal 0
46.	JUMLAH PENGHASILAN PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	Kolom B.6.(3)	Minimal 0
47.	JUMLAH BAGIAN B	Kolom B.(3) JBB	Minimal 0, penjumlahan B.1 s.d. B.5
	BAGIAN C. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	**BAGIAN : C**	
48.	JUMLAH BARANG C	Kolom C.(7) JBC	Minimal 0
	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; HARTA PADA AKHIR TAHUN; KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN; DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA	**LAMPIRAN - II FORMULIR 1770 S**	
	BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU YANG BERSIFAT FINAL	**KOLOM A**	
49.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)/PENGHASILAN BRUTO BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	KOLOM A.1.(3)	Minimal 0
50.	PPh TERUTANG BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	Kolom A.1.(4)	Minimal 0
51.	DPP/PENGHASILAN BRUTO BUNGA/DISKONTO OBLIGASI	Kolom A.2.(3)	Minimal 0
52.	PPh TERUTANG BUNGA/DISKONTO OBLIGASI	Kolom A.2.(4)	Minimal 0
53.	DPP/PENGHASILAN BRUTO PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	Kolom A.3.(3)	Minimal 0
54.	PPh TERUTANG PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	Kolom A.3.(4)	Minimal 0
55.	DPP/PENGHASILAN BRUTO HADIAH UNDIAN	Kolom A.4.(3)	Minimal 0
56.	PPh TERUTANG HADIAH UNDIAN	Kolom A.4.(4)	Minimal 0
57.	DPP/PENGHASILAN BRUTO PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	Kolom A.5.(3)	Minimal 0
58.	PPh TERUTANG PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	Kolom A.5(4)	Minimal 0
59.	DPP/PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	Kolom A.6.(3)	Minimal 0
60.	PPh TERUTANG HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	Kolom A.6.(4)	Minimal 0
61.	DPP/PENGHASILAN BRUTO NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	Kolom A.7.(3)	Minimal 0
62	PPh TERUTANG NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	Kolom A.7.(4)	Minimal 0
63	DPP/PENGHASILAN BRUTO SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	Kolom A.8.(3)	Minimal 0
64	PPh TERUTANG SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	Kolom A.8.(4)	Minimal 0
65	DPP/PENGHASILAN BRUTO BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH	Kolom A.9.(3)	Minimal 0
66	PPh TERUTANG BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGGUN GUNA SERAH	Kolom A.9.(4)	Minimal 0
67	DPP BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI	Kolom A.10.(3)	Minimal 0
68	PPh TERUTANG BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI	Kolom A.10.(4)	Minimal 0
69	DPP DIVIDEN	Kolom A.12.(3)	Minimal 0
70	PPh TERUTANG DIVIDEN	Kolom A.12.(4)	Minimal 0
71	DPP/PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	Kolom A.13.(3)	Minimal 0
72	PPh TERUTANG PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	Kolom A.13.(4)	Minimal 0
73	DPP/PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	Kolom A.14.(3)	Minimal 0

74	PPh TERUTANG BRUTO PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	Kolom A.14(4)	Minimal 0
75	JUMLAH BAGIAN A	Kolom A.(4) JBA	Minimal 0
	BAGIAN B. HARTA PADA AKHIR TAHUN	**KOLOM B**	
76	JUMLAH BAGIAN B	Kolom B.(4)	Minimal 0
	BAGIAN C. KEWAJIBAN PADA AKHIR TAHUN	**KOLOM C**	
77	JUMLAH BAGIAN C	Kolom C.(5)	Minimal 0
	BAGIAN D. DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA		
78	NAMA ANGGOTA KELUARGA	BAGIAN : D. Kolom (2)	Karakter
79	TANGGAL LAHIR	BAGIAN : D. Kolom (3)	DD-MM-YYY
80	HUBUNGAN KELUARGA	BAGIAN : D. Kolom (4)	10 : Istri, 20 : Suami, 30 : Anggota Keluarga Sedarah, 31 : Anak Kandung, 32 : Ayah, 33 : Ibu, 40 : Semenda, 41 : Mertua, 42 : Anak Tiri, 50 : Anak Angkat
81	PEKERJAAN	BAGIAN : D. Kolom (5)	Karakter

LAMPIRAN III.4
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA

NO	NAMA ELEMEN	SUMER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : **. DARI SATU PEMBERI KERJA** **. TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN BUNGA KOPERASI**	**FORM SPT 1770SS**	
1.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
2.	PEMBETULAN KE-...	Pada kotak sudut kanan atas	Minimal 0
	IDENTITAS		
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
4.	NAMA WP, PEKERJAAN, NO. TELEPON & NO. FAKS, KLU	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
5.	PERUBAHAN DATA	Wajib Pajak	
6.	JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN		Minimal 0
7.	JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN		Minimal 0

LAMPIRAN III.5
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WP BADAN	**INDUK SPT FORMULIR 1771**	
1.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT (Tahun SPT)
2.	PEMBETULAN KE-...		Minimal 0
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
4.	NAMA WP	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
5.	JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	
6.	KLU	Diambil dari data Master File WP	
7.	NO. TELP	Diambil dari data Master File WP	
8.	NO. FAKS	Diambil dari data Master File WP	
9.	PERIODE PEMBUKUAN	Diambil dari data Master File WP	MM-YY s/d. MM-YY
10.	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (KHUSUS BUT)	Pada kolom bagian atas	Karakter, khusus untuk BUT, diisi dengan nama Negara Domosili WP
11.	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = diaudit 0 = tidak diaudit
12.	OPINI AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = wajar tanpa Pengecualian 2 = wajar dengan Pengecualian 3 = tidak wajar 4 = tidak ada opini
13.	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Nama kantor akuntan publik
14.	NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	NPWP Akuntan Publik 999999999-999.999
15.	NAMA AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	
16.	NPWP AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	
17.	NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	Nama kantor konsultan pajak
18.	NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	NPWP konsultan pajak 999999999-999.999
19.	NAMA KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	Nama konsultan pajak
20.	NPWP KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	NPWP konsultan pajak 999999999-999.999
	A. PENGHASILAN KENA PAJAK		
21.	PENGHASILAN NETO FISKAL	Kolom A.1.	All values, = kolom 8.(3). formulir 1771-I
22.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	Kolom A.2.	Minimal 0, tidak boleh lebih besar dari A.1.
23.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	Kolom A.3.	Minimal 0, (A.1. - A.2.)
	B. PPh TERUTANG		
24.	PPh YANG TERUTANG	Kolom B.4.	Minimal 0, (Tarif 17 (1)a 17 (2b) 31E (1) X A.3.)
25.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	Kolom B.5.	Minimal 0

26.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom B.6.	Minimal 0, (B.4. + B.5.)
	C. KREDIT PAJAK		
27.	PPh DITANGGUHKAN PEMERINTAH (PROYEK BANTUAN LUAR NEGERI)	Kolom C.7.	Minimal 0
28.	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	Kolom C.8.a.	Minimal 0, = JUMLAH kolom (5) formulir 1771-II
29.	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	Kolom C.8.b.	Minimal 0, = JUMLAH kolom (7) formulir 1771-III
30.	JUMLAH (a + b)	Kolom C.8. JUMLAH	Minimal 0, (C.8.a. + C.8.b.)
31.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI atau PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	Kolom C.9.	Minimla 0, = (B.6. - (C.7. + C.8.)), atau = ((C.7. + C.8.) - B.6.)
32.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	Kolom C.9.a	Diisi : 0, jika : B.6. = (C.7. + C.8.) 1, jika : B.6. > (C.7. + C.8.) 2, jika : B.6. < (C.7. + C.8.)
33.	PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	Kolom C.9.b	
34.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	Kolom C.10.	
35.	PPh PASAL 25 BULANAN	Kolom C.10.a.	Minimal 0
36.	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	Kolom C.10.b.	Minimal 0
37.	JUMLAH (10a + 10b)	Kolom C.10.c.	Minimal 0, (C.10.a.+ C.10.b)
	D. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR		
38.	PPh YANG KURANG DIBAYAR atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (9 - 10e)	Kolom D.11.	Minimal 0, (C.9. - Jumlah C.10.) atau (Jumlah C.10. - C.9.)
39.	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Kolom D.12.	
40.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : A. DIRESTITUSIKAN	Kolom D.13.a	1 = direstitusi 0 = tidak direstitusi
41.	B. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	Kolom D.13.b	1 = diperhitungkan 0 = tidak diperhitungkan
42.	PENGEMBALIAN PENDAHULUAN (PASAL 17C ATAU PASAL 17D UU KUP)	Kolom D.13	1 = diperhitungkan 0 = tidak diperhitungkan
	E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN		
43.	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	Kolom E.14.a.	Minimal 0
44.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	Kolom E.14.b.	Minimal 0, = Kolom A.2.
45.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom E.14.c.	Minimal 0, (F.a. - F.b.)
46.	PPh YANG TERUTANG	Kolom E.14.d.	Minimal 0, (Tarif 17 (1)a 17 (2b) 31E (1) X F.c)
47.	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	Kolom E.14.e	Minimal 0
48.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d-e)	Kolom E.14.f.	Minimal 0, (F.d. - F.e.)
49.	PPh PASAL 25 : (1/12 HURUF f)	Kolom E.14.g.	Minimal 0, (1/12 X F.f)
	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK		
50.	PPh FINAL	Kolom F.15.a.	Minimal 0, = Jumlah KOLOM BAGIAN IV.A.(5)
51.	PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, PENGHASILAN BRUTO	Kolom F.15.b.	Minimal 0, = Jumlah KOLOM BAGIAN IV.A.(3)
	G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA		
52.	ADA TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY	16.a	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
53.	TIDAK ADA TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY	16.b	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada

	G. LAMPIRAN		
54.	SELAIN LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : A. SURAT SETORAN PAJAK	Kolom G.16.a	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
55.	B. LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)	Kolom G.16.b	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
56.	C. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORANG KEUANGAN		Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
57.	D. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.c	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
58.	E. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.d	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
59.	F. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.f	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
60.	G. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.g	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
61.	H. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)	Kolom G.16.h	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
62.	I. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.i	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
63.	J. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.j	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
64.	K. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)	Kolom G.16.k	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
	PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	**LAMPIRAN - I FORMULIR 1771 - I**	
	1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI		
65.	PEREDARAN USAHA	Kolom 1.a.(3).	Minimal 0
66.	HARGA POKOK PENJUALAN	Kolom 1.b.(3).	Minimal 0
67.	BIAYA USAHA LAINNYA	Kolom 1.c.(3).	
68.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA	Kolom 1.d.(3).	Minimal 0
69.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	Kolom 1.e.(3).	Minimal 0
70.	BIAYA DARI LUAR USAHA	Kolom 1.f.(3).	Minimal 0
71.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA	Kolom 1.g.(3).	Minimal 0
72.	JUMLAH	Kolom 1.h.(3).	All values, (1.d. + 1.e.)
73.	**2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI**	Kolom 2	
74.	**3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL**	Kolom 3	
75.	**4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**	Kolom 4	
	5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF		
76.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU ATAU ANGGOTA	Kolom 5.a.(3)	Minimal 0
77.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	Kolom 5.b.(3).	Minimal 0
78.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	Kolom 5.c.(3).	Minimal 0
79.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	Kolom 5.d.(3).	Minimal 0
80.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	Kolom 5.e.(3).	Minimal 0
81.	PAJAK PENGHASILAN	Kolom 5.f.(3).	Minimal 0
82.	GAJI YANG DIBAYAR KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	Kolom 5.g.(3).	Minimal 0
83.	SANKSI ADMINISTRASI	Kolom 5.h.(3).	Minimal 0
84.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	Kolom 5.i.(3).	Minimal 0

85.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	Kolom 5.j.(3).	Minimal 0
86.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	Kolom 5.k.(3).	Minimal 0
87.	PENYESUAI FISKAL POSITIF LAINNYA	Kolom 5.l.(3).	Minimal 0
88.	JUMLAH 5a. s.d. 5l	Kolom 3.m.(3).	Minimal 0
	6. PENYESUAI FISKAL NEGATIF		
89.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	Kolom 6.a.(3).	Minimal 0
90.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	Kolom 6.b.(3).	Minimal 0
91.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	Kolom 6.c.(3).	Minimal 0
92.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	Kolom 6.d.(3).	Minimal 0
93.	JUMLAH 6a. s.d. 6d.	Kolom 6.e.(3).	Minimal 0
94.	**7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE ...**	Kolom 7.a.(2).	
	(Diisi dari Lampiran Khusus 4A angka 5b)	Kolom 7.b.(3).	
95.	**8. PENGHASILAN NETO FISKAL**	Kolom 8.(3).	All values, (Jumlah 1.(3) - Jumlah 2.(3) + Jumlah 3.(3) - Jumlah 4.(3) - Jumlah 5.(3).
	PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA	**LAMPIRAN - II FORMULIR 1771 - II**	
	IDENTITAS (SIDJP tidak perlu mengisi)		
96.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
97.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
98.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
99.	1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
100.	2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM TJR. dsb		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
101.	3. BIAYA TRANSPORTASI		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
102.	4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
103.	5. BIAYA SEWA		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
104.	6. BIAYA BUNGA PINJAMAN		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
105.	7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
106.	8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0

	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
107.	9. BIAYA ROYALTI		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
108.	10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
109.	11. BIAYA LAINNYA		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
110.	12. PERSEDIAAN AWAL		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
111.	13. PERSEDIAAN AKHIR		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
112.	14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	**LAMPIRAN - IIII FORMULIR 1771 - III**	
	IDENTITAS		
113.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
114.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
115.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	MM-YY s/d. MM-YY
116.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	KOLOM (2)	
117.	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	KOLOM (3)	
118.	OBJEK PEMOTONGAN PEMUNGUTAN		Pilih : 1 = Pasal 22 2 = Pasal 23
119.	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	KOLOM (4)	Pilih : 1 s.d 13
120.	RUPIAH	KOLOM (5)	Minimal 0
121.	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT		Minimal 0
122.	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP	KOLOM (6)	Karakter
123.	NOMOR	KOLOM (7)	Karakter
124.	TANGGAL	KOLOM (8)	Date
	PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	**LAMPIRAN - IV FORMULIR 1771 - IV**	
	IDENTITAS		
125.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
126.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
127.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	MM-YY s/d. MM-YY
	BAGIAN A. PPh FINAL		
128.	1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI/SBN	BAGIAN A : Kolom 1.(2).	Minimal 0
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0

	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
129.	2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
130.	3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
131.	4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
132.	5. PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
133.	6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
134.	7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
135.	8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI A. PELAKSANA KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
136.	B. PERENCANA KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
137.	C. PENGAWAS KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
138.	9. PERWAKILAN DAGANG ASING		

	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
139.	10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
140.	11. PELAYARAN DALAM NEGERI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
141.	12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
	BAGIAN : B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
	BANTUAN / SUMBANGAN	BAGIAN B : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	HIBAH	BAGIAN B : Kolom 2.(3).	Minimal 0
142.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 ayat (3) Huruf f UU PPh) US$	BAGIAN B : Kolom 3.(3).	Minimal 0
	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	BAGIAN B : Kolom 4.(3).	Minimal 0
	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	BAGIAN B : Kolom 5.(3).	Minimal 0
	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA	BAGIAN B : Kolom 6.(3).	Minimal 0
143.	..... (LAINNYA-3) US$	BAGIAN B : Kolom 3.(3).	Minimal 0
144.	JUMLAH BAGIAN B	BAGIAN B.(3).	
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN **DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**	**LAMPIRAN - V FORMULIR 1771 - V**	
	A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN		
145.	NAMA	kolom BAGIAN A.(2).	Karakter
146.	ALAMAT	kolom BAGIAN A.(3).	Karakter
147.	NPWP	kolom BAGIAN A.(4).	999999999-999.999
148.	JUMLAH MODAL DISETOR RUPIAH	JUMLAH kolom BAGIAN A.(5).	Minimal 0
149.	DIVIDEN	kolom BAGIAN A.(7).	Minimal 0
150.	JUMLAH BAGIAN A	JUMLAH kolom BAGIAN A.(5). DAN A.(7)	Minimal 0
	B. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS		
151.	NAMA	kolom BAGIAN B.(2).	Karakter
152.	ALAMAT	kolom BAGIAN B.(3).	Karakter

153.	NPWP	kolom BAGIAN B.(4).	999999999-999.999
154.	JABATAN	kolom BAGIAN B.(5).	Karakter
	DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI DAN DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	**LAMPIRAN - VI FORMULIR 1771 - VI**	
155.	NPWP	Bagian atas	Otomatis dari masterfile
156.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas	Otomatis dari masterfile
157.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas	MM-YY s/d. MM-YY
	BAGIAN : A DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI		
158.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
159.	NAMA	kolom BAGIAN A.(2).	Karakter
160.	ALAMAT	Bagian A. (3)	Karakter
161.	NPWP	Bagian A. (4)	999999999-999.999
162.	JUMLAH PENYERTAAN MODAL RUPIAH	Bagian A. (5)	Minimal 0
163.	%	Bagian A. (6)	
	BAGIAN : B DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI		
164.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
165.	NAMA	BAGIAN B.(2).	Karakter
166.	NPWP	BAGIAN B.(3).	999999999-999.999
167.	JUMLAH PINJAMAN	BAGIAN B.(4).	Minimal 0
168.	TAHUN	BAGIAN B.(5).	TTTT (Tahun)
169.	BUNGA/THN %	BAGIAN B.(6).	
	BAGIAN : C DAFTAR PIUTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI		
170.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
171.	NAMA	BAGIAN C.(2).	Karakter
172.	NPWP	BAGIAN C.(3).	999999999-999.999
173.	JUMLAH PINJAMAN	BAGIAN C.(4).	Minimal 0
174.	TAHUN	BAGIAN C.(5).	TTTT (Tahun)
175.	BUNGA/THN %	BAGIAN C.(6).	

PEREKAMAN DATA LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	**LAMPIRAN - III FORMULIR 1771 - III**	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
176.	NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	Kolom (2)	Karakter
177.	NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	Kolom (3)	999999999-999.999
178.	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN : JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	Kolom (4)	1 = Pasal 22 2 = Pasal 23
179.	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN : RUPIAH	Kolom (5)	Pilih 1 s.d 13
180.	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	Kolom (6)	Minimal 0
181.	BUKTI POTONG / PUNGUT : NORMAL	Kolom (6)	Karakter
182.	BUKTI POTONG / PUNGUT : TANGGAL	Kolom (7)	Date
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN, DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	**LAMPIRAN - V FORMULIR 1771 - V**	
	BAGIAN A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN	**BAGIAN A.**	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
183.	NAMA PEMEGANG SAHAM	BAGIAN : A Kolom (2)	Karakter
184.	ALAMAT PEMEGANG SAHAM	BAGIAN : A Kolom (3)	Karakter

185.	NPWP PEMEGANG SAHAM	BAGIAN : A Kolom (4)	999999999-999.999 dalam hal pemegang saham/pemilik bukan WP luar negeri atau bukan publik, maka NPWP harus diisi
186.	JUMLAH MODAL DISETOR (RUPIAH)	BAGIAN : A Kolom (5)	Minimal 0
187.	% JUMLAH MODAL DISETOR (%)	BAGIAN : A Kolom (6)	Minimal 0,00
188.	DIVIDEN (RUPIAH)	BAGIAN : A Kolom (7)	Minimal 0
	BAGIAN B. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	BAGIAN B.	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
189.	NAMA PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN : B Kolom (2)	Karakter
190.	ALAMAT PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN : B Kolom (3)	Karakter
191.	NPWP PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN : B Kolom (4)	999999999-999.999 dalam hal pengurus/komisaris bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
192.	JABATAN PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN : B Kolom (5)	Karakter
	DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI DAN DAFTAR PINJAMAN (UTANG/PIUTANG) DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	**LAMPIRAN - VI FORMULIR 1770 - VI**	
	BAGIAN A. DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI	**BAGIAN A.**	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
193.	NAMA PERUSAHAAN	BAGIAN A : Kolom (2)	Karakter
194.	ALAMAT PERUSAHAAN	BAGIAN A : Kolom (3)	Karakter
195.	NPWP PERUSAHAAN	BAGIAN A : Kolom (4)	999999999-999.999 dalam hal perusahaan bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
196.	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (RUPIAH)	BAGIAN A : Kolom (5)	Minimal 0
197.	% JUMLAH PENYERTAAN MODAL	BAGIAN A : Kolom (6)	Minimal 0,00
	BAGIAN B. DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	**BAGIAN B.**	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
198.	NAMA PEMINJAM	BAGIAN B : Kolom (2)	Karakter
199.	NPWP PEMINJAM	BAGIAN B : Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal peminjam bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
200.	JUMLAH PINJAMAN	BAGIAN B : Kolom (4)	Minimal 0
201.	TAHUN PINJAMAN	BAGIAN B : Kolom (5)	TTTT (Tahun)
202.	BUNGA PER TAHUN	BAGIAN B : Kolom (6)	Minimal 0,00
	BAGIAN B. DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	**BAGIAN B.**	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
203.	NAMA PEMINJAM	BAGIAN B : Kolom (2)	Minimal 0,00
204.	NPWP PEMINJAM	BAGIAN B : Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal peminjam bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
205.	JUMLAH PINJAMAN	BAGIAN B : Kolom (4)	Minimal 0

206.	TAHUN PINJAMAN	BAGIAN B : Kolom (5)	TTTT (Tahun)
207.	BUNGA PER TAHUN	BAGIAN B : Kolom (6)	Minimal 0,00

LAMPIRAN III.6
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WP BADAN	**INDUK SPT FORMULIR 1771**	
1.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT (Tahun SPT)
2	PEMBETULAN KE-....		Minimal 0
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
4.	NAMA WP	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
5.	JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	
6.	KLU	Diambil dari data Master File WP	
7.	NO. TELP	Diambil dari data Master File WP	
8.	NO. FAKS	Diambil dari data Master File WP	
9.	PERIODE PEMBUKUAN	Diambil dari data Master File WP	MM-YY s/d. MM-YY
10.	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (KHUSUS BUT)	Pada kolom bagian atas	Karakter, khusus untuk BUT, diisi dengan nama Negara Domisili WP
11.	PERSETUJUAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AS : NOMOR TANGGAL MULAI TAHUN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	
12.	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = diaudit 0 = tidak diaudit
13.	OPINI AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = wajar tanpa pengecualian 2 = wajar dengan pengecualian 3 = tidak wajar 4 = tidak ada opini
14.	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Nama kantor akuntan publik
15.	NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	NPWP Akuntan Publik 999999999-999.999
16.	NAMA AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	
17.	NPWP AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	
18.	NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	Nama kantor konsultan pajak
19.	NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	NPWP konsultan pajak 999999999-999.999
20.	NAMA KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	Nama konsultan pajak
21.	NPWP KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	NPWP konsultan pajak 999999999-999.999
	A. PENGHASILAN KENA PAJAK		
22.	1. PENGHASILAN NETO FISKAL US$	Kolom A.1.(3)	All values, = kolom 6.(3). formulir 1771-1
23.	1. PENGHASILAN NETO FISKAL RUPIAH	Kolom A.1.(4)	
24.	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL US$	Kolom A.2.(3)	Minimal 0, tidak boleh lebih besar dari A.1.
25.	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL RUPIAH	Kolom A.2.(4)	
26.	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) US$	Kolom A.3.(3)	Minimal 0, (A.1. - A.2.)

27.	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) RUPIAH	Kolom A.3.(4)	
	B. PPh TERUTANG		
28.	4. PPh YANG TERUTANG US$	Kolom B.4.(3)	Minimal 0, (Tarif 17 (1)a 17 (2b) 31E (1) X A.3.)
29.	4. PPh YANG TERUTANG RUPIAH	Kolom B.4.(4)	
30.	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU US$	Kolom B.5.(3)	Minimal 0
31.	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU RUPIAH	Kolom B.5.(4)	
32.	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG US$	Kolom B.6.(3)	Minimal 0, (B.4. + B.5.)
33.	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG RUPIAH	Kolom B.6.(4)	
	C. KREDIT PAJAK		
34.	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (PROYEK BANTUAN LUAR NEGERI)US$	Kolom C.7.(3)	Minimal 0
35.	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (PROYEK BANTUAN LUAR NEGERI) RUPIAH	Kolom C.7.(4)	Minimal 0
36.	8. A. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	Kolom C.8.a.(3)	Minimal 0, = JUMLAH kolom (5) formuli 1771-II
37.	8. A. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	Kolom C.8.a.(4)	
38.	8. B. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI US$	Kolom C.8.b.(3)	Minimal 0, = JUMLAH kolom (7) formulir 1771-III
39.	8. B. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI RUPIAH	Kolom C.8.b.(4)	
40.	JUMLAH (a + b) US$	Kolom C.8.JUMLAH	Minimal 0, (C.8.a. + C.8.b.
41.	JUMLAH (a + b) RUPIAH	Kolom C.8.JUMLAH	
42.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI atau PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT US$	Kolom C.9.(3)	Minimla 0, = (B.6. - (C.7. + C.8.)), atau = ((C.7. + C.8.) - B.6.)
43.	RUPIAH	Kolom C.9.(4)	
44.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI US$	Kolom C.9.a.(3)	Diisi : 0, jika : B.6. = (C.7. + C.8.) 1, jika : B.6. > (C.7. + C.8.) 2, jika : B.6. < (C.7. + C.8.)
45.	RUPIAH	Kolom C.9.a.(4)	
46.	PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT US$	Kolom C.9.b.(3)	
47.	RUPIAH	Kolom C.9.b.(4)	
48.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI US$	Kolom C.10.(3)	
49.	RUPIAH	Kolom C.10.(4)	
50.	PPh PASAL 25 BULANAN US$	Kolom C.10.a.(3)	Minimal 0
51.	RUPIAH	Kolom C.10.a.(4)	
52.	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) US$	Kolom C.10.b.(3)	Minimal 0
53.	RUPIAH	Kolom C.10.b.(4)	
54.	JUMLAH (10a + 10b)	Kolom C.10.c.(3)	Minimal 0, (C.10a. +C.10.b.)
55.	RUPIAH	Kolom C.10.c.(4)	
	D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR		
56.	PPh YANG KURANG DIBAYAR atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (9 - 10e)	Kolom D.11.(3)	Minimal 0, (C.9. - Jumlah C.10.) atau (Jumlah C.10. - C.9)
57.	RUPIAH	Kolom D.11.(4)	
58.	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Kolom D.12	
59.			
60.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON: A. DIRESTITUSIKAN	Kolom D.13.a	1 = direstitusi 0 = tidak direstitusi
61.	B. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	Kolom D.13.b	1 = diperhitungkan 0 = tidak diperhitungkan
62.	PENGEMBALIAN PENDAHULUAN (PASAL 17C ATAU PASAL 17D UU KUP	Kolom D.13	1 = diperhitungkan 0 = tidak diperhitungkan
	E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN		
63.	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	Kolom E.14.a.(3)	Minimal 0
64.	RUPIAH	Kolom E.14.a.(4)	

65.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	Kolom E.14.b.(3)	Minimal 0, = Kolom A.2.
66.	RUPIAH	Kolom E.14.b.(4)	
67.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom E.14.c.(3)	Minimal 0, (F.a - F.b.)
68.	RUPIAH	Kolom E.14.c.(4)	
69.	PPh YANG TERUTANG	Kolom E.14.d.(3)	Minimal 0, (Tarif 17 (1)a 17 (2b) 31E (1) X F.c.)
70.	RUPIAH	Kolom E.14.d.(4)	
71.	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	Kolom E.14.e.(3)	Minimal 0
72.	RUPIAH	Kolom E.14.e.(4)	
73.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d-e)	Kolom E.14.f.(3)	Minimal 0, (F.d. - F.e.)
74.	RUPIAH	Kolom E.14.f.(4)	
75.	PPh PASAL 25 : (1/12 HURUF f)	Kolom E.14.g.(3)	Minimal 0, (1/12 X F.f.)
76.	RUPIAH	Kolom E.14.g.(4)	
	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK		
77.	PPh FINAL	Kolom F.15.a.(3)	Minimal 0, = Jumlah KOLOM BAGIAN IV.A.(5)
78.	RUPIAH	Kolom F.15.a.(4)	
79.	PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, PENGHASILAN BRUTO	Kolom F.15.b.(3)	Minimal 0, = Jumlah KOLOM BAGIAN IV.A.(3)
80.	RUPIAH	Kolom F.15.b.(4)	
	G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA		
81.	ADA TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY	16.a	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
82.	TIDAK ADA TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY		Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
	H. LAMPIRAN		
83.	SELAIN LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, 1771,VI, BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : A. SURAT SETORAN PAJAK	Kolom G.16.a	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
84.	B LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)	Kolom G.16.b	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
	C. TRANSKIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN		Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
85.	D. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.c	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
86.	E. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.d	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
87.	F. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.f	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
88.	G. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.g	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
89.	H. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)	Kolom G.16.h	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
90.	I. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.i	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
91.	J. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.j	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
92.	K. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)	Kolom G.16.k	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
	PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	**LAMPIRAN -I FORMULIR 1771 - I**	

	1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI		
93.	PEREDARAN USAHA US$	Kolom 1.a.(3)	Minimal 0
94.	HARGA POKOK PENJUALAN US$	Kolom 1.b.(3)	Minimal 0
95.	BIAYA USAHA LAINNYA US$	Kolom 1.c.(3)	
96.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA US$	Kolom 1.d.(3)	Minimal 0
97.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA US$	Kolom 1.e.(3)	Minimal 0
98.	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	Kolom 1.f.(3)	Minimal 0
99.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA US$	Kolom 1.g.(3)	Minimal 0
100.	JUMLAH US$	Kolom 1.h.(3)	All valueS, (1.d. + 1.e.)
	2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI US$	Kolom 2	
	3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL US$	Kolom 3	
	4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK US$	Kolom 4	
101.	**5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF**		
102.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU ATAU ANGGOTA US$	Kolom 5.a.(3).	Minimal 0
103.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN US$	Kolom 5.b.(3).	Minimal 0
104.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN US$	Kolom 5.c.(3).	Minimal 0
105.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN US$	Kolom 5.d.(3).	Minimal 0
106.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN US$	Kolom 5.e.(3).	Minimal 0
107.	PAJAK PENGHASILAN US$	Kolom 5.f.(3).	Minimal 0
108.	GAJI YANG DIBAYAR KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM US$	Kolom 5.g.(3).	Minimal 0
109.	SANKSI ADMINISTRASI US$	Kolom 5.h.(3).	Minimal 0
110.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL US$	Kolom 5.i.(3).	Minimal 0
111.	SELISI AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL US$	Kolom 5.j.(3).	Minimal 0
112.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA US$	Kolom 5.k.(3).	Minimal 0
113.	PENYESUAI FISKAL POSITIF LAINNYA US$	Kolom 5.l.(3).	Minimal 0
114.	JUMLAH 5a. s.d. 5l US$	Kolom 3.m.(3).	Minimal 0
	6. PENYESUAI FISKAL NEGATIF		
115.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL US$	Kolom 6.a.(3).	Minimal 0
116.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL US$	Kolom 6.b.(3).	Minimal 0
117.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA US$	Kolom 6.c.(3).	Minimal 0
118.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA US$	Kolom 6.d.(3).	Minimal 0
119.	JUMLAH 6a. s.d. 6d. US$	Kolom 6.e.(3).	Minimal 0
	7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE ...	Kolom 7.a.(2).	
120.	(Diisi dari Lampiran Khusus 4A angka 5b)	Kolom 7.b.(3).	
	8. PENGHASILAN NETO FISKAL US$	Kolom 8.(3).	All values, (Jumlah 1.(3) - Jumlah 2.(3) + Jumlah 3.(3) - Jumlah 4.(3) - Jumlah 5.(3).
	PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA	**LAMPIRAN -I FORMULIR 1771 - I**	
	IDENTITAS		
121.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis diambil dari masterfile
122.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis diambil dari masterfile
123.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	MM-YY s/d. MM-YY
124.	1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN		

	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
125.	2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TJR, dsb		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
126.	3. BIAYA TRANSPORTASI		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
127.	4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
128.	5. BIAYA SEWA		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
129.	6. BIAYA BUNGA PINJAMAN		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
130.	7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
131.	8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
132.	9. BIAYA ROYALTI		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
133.	10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
134.	11. BIAYA LAIN-LAIN		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
135.	12. PERSEDIAAN AWAL		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
136.	13. PERSEDIAAN AKHIR		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
137.	14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13		
	HARGA POKOK PENJUALAN US$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0

	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	**LAMPIRAN -III FORMULIR 1771 - III**	
	IDENTITAS		
138.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
139.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
140.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	MM-YY s/d. MM-YY
141.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	KOLOM (2)	
142.	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	KOLOM (3)	
143.	OBJEK PEMOTONG PEMUNGUTAN		Minimal 0
144.	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	KOLOM (4)	Minimal 0
145.	US$	KOLOM (5)	Minimal 0
146.	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT US$		Minimal 0
147.	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP	KOLOM (6)	Karakter
148.	NOMOR	KOLOM (7)	Karakter
149.	TANGGAL	KOLOM (8)	Date
	PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	**LAMPIRAN -IV FORMULIR 1771 - IV**	
	IDENTITAS		
150.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
151.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
152.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	MM-YY s/d. MM-YY
153.	**BAGIAN A. PPh FINAL**		
154.	1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI/SBN US$	BAGIAN A :Kolom 1.(2).	
	DASAR PENGENAAN PAJAK US$	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
155.	2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
156.	3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
157.	4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
158.	5. PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER/ AGEN PRODUK BBM		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
159.	6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US$	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0

	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
160.	7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US$	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
161.	8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI A. PELAKSANA KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US$	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
162.	B. PERENCANA KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US$	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
163.	C. PENGAWAS KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US$	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
164.	9. PERWAKILAN DAGANG ASING		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US$	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
165.	10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US$	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
166.	11. PELAYARAN DALAM NEGERI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US$	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
167.	12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US$	BAGIAN A :Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A :Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US$	BAGIAN A :Kolom 1.(5).	Minimal 0
	BAGIAN : B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
168.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PNYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh) US$	BAGIAN B : Kolom 1.(3).	Minimal 0
169.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA	BAGIAN B : Kolom 2.(3).	Minimal 0
170.	..... (LAINNYA-3) US$	BAGIAN B : Kolom 3.(3).	Minimal 0
171.	JUMLAH BAGIAN B	BAGIAN B.(3).	

	DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN SEJUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN **DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**	**LAMPIRAN -V** **FORMULIR 1771 - V**	
	A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN		
172.	NAMA	kolom BAGIAN A.(2).	Karakter
173.	ALAMAT	kolom BAGIAN A.(3).	Karakter
174.	NPWP	kolom BAGIAN A.(3).	
175.	JUMLAH MODAL DISETOR US$	JUMLAH kolom BAGIAN A.(5).	Minimal 0
176.	DIVIDEN US$	kolom BAGIAN A.(5).	Minimal 0
177.	JUMLAH BAGIAN US$	JUMLAH kolom BAGIAN A.(5). DAN A.(7).	Minimal 0
	B. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS		
178.	NAMA	kolom BAGIAN B.(2).	Karakter
179.	ALAMAT	kolom BAGIAN B.(3).	Karakter
180.	NPWP	kolom BAGIAN B.(4).	999999999-999.999
181.	JABATAN	kolom BAGIAN B.(5).	Karakter
	DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI DAN DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	**LAMPIRAN - VI** **FORMULIR 1771 - VI**	
182.	NPWP	Bagian atas	Otomatis dari masterfile
183.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas	Otomatis dari masterfile
184.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas	MM-YY s/d. MM-YY
	BAGIAN : A DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI		
185.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
186.	NAMA	Kolom BAGIAN A.(2).	Karakter
187.	ALAMAT	Bagian A.(3)	Karakter
188.	NPWP	Bagian A.(4)	999999999-999.999
189.	JUMLAH PENYERTAAN MODAL US$	Bagian A.(5)	Minimal 0
190.	%	Bagian A.(6)	
	BAGIAN : B DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI		
191.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
192.	NAMA	BAGIAN B.(2).	Karakter
193.	NPWP	BAGIAN B.(3).	999999999-999.999
194.	JUMLAH PINJAMAN US$	BAGIAN B.(4).	Minimal 0
195.	TAHUN	BAGIAN B.(5).	TTTT (Tahun)
196.	BUNGA/THN %	BAGIAN B.(6).	
	BAGIAN : C DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI		
197.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
198.	NAMA	BAGIAN C.(2).	Karakter
199.	NPWP	BAGIAN C.(3).	999999999-999.999
200.	JUMLAH PINJAMAN US$	BAGIAN C.(4).	Minimal 0
201.	TAHUN	BAGIAN C.(5).	TTTT (Tahun)
202.	BUNGA/THN %	BAGIAN C.(6).	Minimal 0

PEREKAMAN DATA LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	**LAMPIRAN -III** **FORMULIR 1771 - III / $**	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
203.	NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	Kolom (2)	Karakter
204.	NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	Kolom (3)	999999999-999.999
205.	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN : JENIS PENGHASILAN	Kolom (4)	Karakter
206.	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	Kolom (5) (US $)	Minimal 0
207.	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT	Kolom (6)(US $) Untuk PPh Pasal 22 dan 23	Minimal 0

208.	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	Kolom (7) (RUPIAH) Untuk PPh Pasal 22 dan 23	Minimal 0
209.	BUKTI POTONG / PUNGUT : NOMOR	Kolom (8)	Karakter
210.	BUKTI POTONG / PUNGUT : TANGGAL	Kolom (9)	Date
	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	**LAMPIRAN KHUSUS 7 A/7B FORMULIR 1771**	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
211.	NAMA PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	Kolom (2)	Karakter
212.	ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	Kolom (3)	Karakter
213.	JENIS PENGHASILAN	Kolom (4)	Karakter
214.	JUMLAH NETO	Kolom (5) (US $)	Minimal 0
215.	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI	Kolom (6) (US $)	Minimal 0
216.	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI	Kolom (7) (VALAS)	Minimal 0
217.	KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN	Kolom (8) (US $)	Minimal 0
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	**LAMPIRAN - V FORMULIR 1771-V / $**	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
	BAGIAN A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL	**BAGIAN A.**	
218.	NAMA PEMEGANG SAHAM	BAGIAN : A Kolom (2)	Karakter
219.	ALAMAT PEMEGANG SAHAM	BAGIAN : A Kolom (3)	Karakter
220.	NPWP PEMEGANG SAHAM	BAGIAN : A Kolom (4)	999999999-999.999 dalam hal pemegang saham/pemilik bukan WP luar negeri atau bukan publik, maka NPWP harus diisi
221.	JUMLAH MODAL DISETOR	BAGIAN : A Kolom (5) (US $)	Minimal 0
222.	% JUMLAH MODAL DISETOR (%)	BAGIAN : A Kolom (6)	Minimal 0,00
	BAGIAN B. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	**BAGIAN B.**	
223.	NAMA PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN : B Kolom (2)	Karakter
224.	ALAMAT PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN : B Kolom (3)	Karakter
225.	NPWP PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN : B Kolom (4)	999999999-999.999 dalam hal pengurus/komisaris bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
226.	JABATAN PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN : B Kolom (5)	Karakter
	DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI DAN DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	**LAMPIRAN - VI FORMULIR 1770-VI / $**	**Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak**
	BAGIAN A. DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI		
227.	NAMA PERUSAHAAN	BAGIAN : A Kolom (2)	Karakter
228.	ALAMAT PERUSAHAAN	BAGIAN : A Kolom (3)	Karakter
229.	NPWP PERUSAHAAN	BAGIAN : A Kolom (4)	999999999-999.999 dalam hal perusahaan bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
230.	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	BAGIAN : A Kolom (5) (US $)	Minimal 0
231.	% JUMLAH PENYERTAAN MODAL	BAGIAN : A Kolom (6)	Minimal 0,00
	BAGIAN B. DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	BAGIAN B.	
232.	NAMA PEMINJAM	BAGIAN : B Kolom (2)	Karakter
233.	ALAMAT PEMINJAM	BAGIAN : B Kolom (2)	Karakter
234.	NPWP PEMINJAM	BAGIAN : B Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal peminjam bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
235.	JUMLAH PINJAMAN	BAGIAN : B Kolom (4) (US $)	Minimal 0

236.	TAHUN PINJAMAN	BAGIAN : B Kolom (5)	TTTT (Tahun)
237.	BUNGA PER TAHUN	BAGIAN : B Kolom (6)	Minimal 0,00

LAMPIRAN III.7
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI
PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	INDUK SPT (FORMULIR 1770)	**INDUK SPT FORMULIR 1770**	
1.	TANGGAL SPT DITERIMA	Tanggal SPT diterima	HH-B-TTTT (Tanggal-Bulan-Tahun) Hanya diisi jika tidak diterima langsung dari WP
2.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
3.	TAHUN BUKU	Pada kotak sudut kanan atas	BB-TT s.d. BB-TT
4.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
5.	NAMA WP, ALAMAT, JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
6.	CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO	Kolom A (kotak).	Diisi : 0 = norma 1 = diaudit 2 = opini akuntan 3 = tidak diaudit
7.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN	Kolom B.9.	All values, (A.7. - B.8.)
8.	STATUS KELUARGA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.10. (TANDA PADA KOTAK)	Diisi : 0 = tidak diberi tanda X = warisan yang belum terbagi 1 = TK = tidak kawin, 2 = K = kawin, 3 = K / I = kawin istri berpenghasilan, 4 = PH = kawin pisah harta dan penghasilan, 5 = HB = kawin, hidup berpisah
9.	JUMLAH TANGGUNGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.10. (.....)	Diisi : 0 = tidak ada tanggungan 1 = 1 anak 2 = 2 anak 3 = 3 anak
10.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.10.	Minimal 0, sesuai dengan perhitungan PTKP
11.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom B.11.	Minimal 0, (B.9 - B.10)
12.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom C.14.	Minimal 0, (C.12. + C.13.)
13.	PPh PASAL 25 BULANAN	Kolom D.17.a.	Minimal 0
14.	PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.19.	Minimal 0, (D.16. - Jumlah Kolom D.17.) atau (Jumlah Kolom D.17. - D.16.)
15.	KODE PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.19. (KOTAK).	Diisi : 0, jika : D.16 = Jumlah Kolom D.17. 1, jika : D.16 > Jumlah Kolom D.17. 2, jika jumlah kolom D.16. < Jumlah Kolom D.17.
16.	PERMOHONAN PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 19.b MOHON :	Kolom E.	Diisi : 0 = tidak diisi 1 = direstitusikan 2 = diperhitungkan dengan utang pajak
17.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	Kolom F.	Minimal 0

18.	KODE ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUT	Kolom F.	Diisi : 0 = 1/12 JUMLAH PADA ANGKA 16.a. 1 = PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
19.	PEREDARAN USAHA	Kolom 1.a.	Minimal 0
20.	TANGGAL PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.19. (dari SSP PPh PASAL 29)	Date, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE E.19 = 1
21.	JUMLAH PPh KURANG BAYAR	Kolom E.19. (dari SSP PPh PASAL 29)	Minimal 0, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE E.19 = 1

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS	**INDUK SPT FORMULIR 1770 S**	
1.	TANGGAL SPT DITERIMA	Tanggal SPT diterima	HH-B-TTTT (Tanggal-Bulan-Tahun) Hanya diisi jika tidak diterima langsung dari WP
2.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
4.	NAMA, WP, ALAMAT, JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
5.	JUMLAH PENGHASILAN NETO	Kolom A.4.	All values, A.1. + A.2. + A.3.)
6.	STATUS KELUARGA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.6. (TANDA PADA KOTAK)	Diisi : 0 = tidak diberi tanda X = warisan yang belum terbagi 1 = TK = tidak kawin, 2 = K = kawin, 3 = K / I = kawin istri berpenghasilan, 4 = PH = kawin pisah harta dan penghasilan, 5 = HB = kawin, hidup berpisah
7.	JUMLAH TANGGUNGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.6. (.....)	Diisi : 0 = tidak ada tanggungan 1 = 1 anak 2 = 2 anak 3 = 3 anak
8.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.6.	Minimal 0, sesuai dengan perhitungan PTKP
9.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom B.7.	Minimal 0, (B.4 - B.7)
10.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom C.11.	Minimal 0, (C.9. + C.10.)
11.	PPh PASAL 25 ayat (1)	Kolom D.14.a.	Minimal 0
12.	PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.15.	Minimal 0, (D.13. - Jumlah Kolom D.14.) atau (Jumlah Kolom D.14. - D.13.)
13.	KODE PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.15. (KOTAK).	Diisi : 0, jika : D.13 = Jumlah Kolom D.14. 1, jika : D.13 > Jumlah Kolom D.14. 2, jika jumlah kolom D.13. < Jumlah Kolom D.14.
14.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 15.b MOHON :	Kolom F.	Diisi : 0 = tidak diisi 1 = direstitusikan 2 = diperhitungkan dengan utang pajak
15.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	Kolom G.	Minimal 0,
16.	KODE ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUT	Kolom G. (Kotak)	Diisi : 0 = 1/12 JUMLAH PADA ANGKA 16.a. 1 = PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIR
17.	TANGGAL PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.15. (dari SSP PPh PASAL 29)	Date, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE F.15 = 1
18.	JUMLAH PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.15. (dari SSP PPh PASAL 29)	Minimal 0, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE F.15 = 1

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI	**INDUK SPT FORMULIR 1770 SS**	
1.	TANGGAL SPT DITERIMA	Tanggal SPT diterima	HH-B-TTTT (Tanggal-Bulan-Tahun) Hanya diisi jika tidak diterima langsung dari WP
2.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
4.	NAMA WP, PEKERJAAN, KLASIFIKASI JENIS USAHA, NO. TELEPON & NO. FAKSIMILI	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
5.	PERUBAHAN DATA	Wajib Pajak	
6.	JUMLAHAN KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN	-	Minimal 0, sesuai dari harta yang dipunyai
7.	JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN	-	Minimal 0, sesuai dengan kewajiban/utang yang dimiliki

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN
PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WP BADAN	**INDUK SPT FORMULIR 1771**	
1.	TANGGAL SPT DITERIMA	Tanggal SPT diterima	HH-B-TTTT (Tanggal-Bulan-Tahun) Hanya diisi jika tidak diterima langsung dari WP
2.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT (Tahun SPT)
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
4.	NAMA WP, ALAMAT, JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
	PERIODE PEMBUKUAN		
5.	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = diaudit 2 = tidak diaudit
6.	OPINI AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = wajar tanpa pengecualian 2 = wajar dengan pengecualian 3 = tidak wajar 4 = tidak ada opini
7.	PENGHASILAN NETO FISKAL	Kolom A.1.	All values
8.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	Kolom A.3.	Minimal 0
9.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom B.6.	Minimal 0
10.	PPh PASAL 25 BULANAN	Kolom C.10.a.	Minimal 0
11.	PPh YANG KURANG DIBAYAR atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (9 - 10)	Kolom D.11.	Minimal 0, =(C.9. - Jumlah C.10.), atau (jumlah C.10. - C.9.)
12.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON	Kolom D.13.	Diisi : 0 = tidak diisi 1 = direstitusikan diperhitungkan dengan utang pajak
13.	PPh PASAL 25 : (1/12 HURUF f)	Kolom E.14g.	Minimal 0, (1/2 X F.f.)
14.	PEREDARAN USAHA	Kolom 1.a.(3). 1771-I	Minimal 0
15.	TANGGAL PEMBAYARAN PPh PASAL 29	SSP PPh PASAL 29	Date
16.	JUMLAH PPh PASAL 29	SSP PPh PASAL 29	Minimal 0, diisi > jika KODE Kolom D.11. = 1 (Kurang Bayar)

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUAN PPh WP BADAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT	**INDUK SPT FORMULIR 1771 / $**	
1.	TANGGAL SPT DITERIMA	Tanggal SPT diterima	HH-B-TTTT (Tanggal-Bulan-Tahun) Hanya diisi jika tidak diterima langsung dari WP
2.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	BB-TT s.d. BB-TT (Bulan Tahun s.d. Bulan Tahun)
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
4.	NAMA WP, ALAMAT, JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
5.	PERSETUJUAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AS : NOMOR	Pada kolom bagian tengah	Karakter
6.	PERSETUJUAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AS : TANGGAL	Pada kolom bagian tengah	Date
7.	MULAI TAHUN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	TTTT
8.	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = diaudit 2 = tidak diaudit
9.	OPINI AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = wajar tanpa pengecualian 2 = wajar dengan pengecualian 3 = tidak wajar 4 = tidak ada opini
10.	PENGHASILAN NETO FISKAL	Kolom A.1. US $	All values = kolom 6 formulir 1771-I
11.	PENGHASILAN NETO FISKAL	Kolom A.1. RUPIAH	All values
12.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	Kolom A.3. US $	Minimal 0, (A.1. - A.2.)
13.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	Kolom A.3. RUPIAH	Minimal 0
14.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom B.6. US $	Minimal 0, (B.4. + B.5.)
15.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom B.6. RUPIAH	Minimal 0
16.	PPh PASAL 25 BULANAN	Kolom C.10.a US $	Minimal 0
17.	PPh PASAL 25 BULANAN	Kolom C.10.a RUPIAH	Minimal 0
18.	PPh YANG KURANG DIBAYAR atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (9 - 10e)	Kolom D.11. US $	Minimal 0, = (C.9. - Jumlah C.10.), atau (Jumlah C.10. - C.9.)
19.	PPh YANG KURANG DIBAYAR atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (9 - 10)	Kolom D.11. RUPIAH	Minimal 0
20.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON	Kolom E. Jika C.9. < Jumlah C.10.	Diisi : 0 = tidak diisi 1 = direstitusikan diperhitungkan dengan utang pajak
21.	PPh PASAL 25 : (1/12 HURUF f)	Kolom E.g.US $	Minimal 0, (1/12 X F.f.)
22.	PPh PASAL 25 : (1/12 HURUF f)	Kolom E.g.RIBUAN RUPIAH	Minimal 0
23.	PEREDARAN USAHA	Kolom 1.a.(3). 1771-I$	Minimal 0
24.	TANGGAL PEMBAYARAN PPh PASAL 29	SSP PPh PASAL 29	Date
25.	JUMLAH PPh PASAL 29	SSP PPh PASAL 29	Minimal 0, diisi > jika KODE Kolom D.11. = 1 (Kurang Bayar)

LAMPIRAN III.8
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-2/PJ/2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

LEMBAR PENELITIAN SPT 1770
DENGAN KOMPUTER

NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
NAMA WP : .....
TAHUN PAJAK : .....

I. <u>Unsur-unsur dalam SPT yang salah/seharusnya diisi :</u>

Form 1770 - I
Bagian A :

☐ Jumlah 1.c. # (1.a. - 1.b)

☐ Jumlah 1.e. # (1.c. - 1.d)

☐ Jumlah 2.l. # (2.a. + 2.b. + ... + 2.j. + 2.k.)

☐ Jumlah 3.d. # (3.a. + 3.b. + 3.c.)

☐ Jumlah 4. # Jumlah (1.e. + 2.l - 3.d.)

Bagian B :

☐ Jumlah (3). # (1.(3). + 2.(3). + 3.(3). + 4.(3). + 5.(3).)

☐ Jumlah (5). # (1.(5). + 2.(5). + 3.(5). + 4.(5). + 5.(5).)

Bagian C :

☐ Jumlah (5). # (1.(5). + 2.(5). + 3.(5). + 4.(5). + 5.(5). + 6.(5).)

Bagian D :

☐ Jumlah (3). # penjumlahan item pada kolom (3)

Form 1770 - II
Bagian A :

☐ Jumlah (7). # penjumlahan item pada kolom (7)

Form 1770 - III
Bagian A :

☐ Jumlah (4). # jumlah (I.1.(4). + ... + I.11.(4).+ I.12.(4). + I.14.(4). + I.15.(4). + I.16.(4).)

Bagian B :

☐ Jumlah (3). # (1.(3). + 2.(3). + 3.(3). + 4.(3). + 5.(3). + 6.(3).)

Bagian C :

☐ # Penjumlahan

Form 1770

☐ A.1. # 1770-I Bagian A. atau Bagian B.(5).

☐ A.2. # 1770-I Bagian C. JUMLAH.(5).

☐ A.3. # 1770-I Bagian D. JUMLAH.(3).

☐ A.4. # 1770-II Bagian A. JUMLAH.(7).

☐ A.5. # (A.1. + A.2. + A.3. + A.4.)

☐ A.7. # (A.5. - A.6.)

☐ B.9. # (A.7. - B.8.)

☐ B.10. # nilai PTKP

☐ B.11. # (B.9. - B.10.)

☐ C.12. # PENERAPAN TARIF Pasal 17 x B.11.

☐ C.14. # C.12 + C.13.

☐ D.15. # 1770-ll Bagian A.(7)

☐ D.16.. # (C.14. - D.15.) atau D.16. # (D.15. - C.14.)

☐ D.17. # (D.17.a. + D.17.b. + D.17.c..)

☐ D.19.a. # (D.16. - D.18.) atau D.19.b. # (D.17. - D.18.)

☐ F # (16./12)

II. Ketetapan waktu penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 29 :

1. Tanggal Masuk SPT : ..... (tepat waktu / terlambat)
2. Tanggal Pembayaran PPh Pasal 29 : ..... (tepat waktu / terlambat)

....., ...-.....-20.....
Operator Data Entry,

.....
NIP.....

Beri tanda √ dalam ☐ yang sesuai

D.1.1.22.02

LEMBAR PENELITIAN SPT 1770 S
DENGAN KOMPUTER

NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
NAMA WP : .....
TAHUN PAJAK : .....

I. <u>Unsur-unsur dalam SPT yang salah/seharusnya diisi :</u>

Lampiran I Form 1770 S
Bagian A :

☐ Jumlah Bagian A.(3) # penjumlahan item pada kolom A.(3).

Bagian B :

☐ Jumlah Bagian B.(3) # penjumlahan item pada kolom A.(3).

Bagian C:

☐ Jumlah Bagian C.(7) # penjumlahan item pada kolom C.(7).

Lampiran II Form 1770 S
Bagian A :

☐ Jumlah Bagian A.(4) # penjumlahan item pada kolom A.(4).

Bagian B :

☐ Jumlah Bagian B.(4) # penjumlahan item pada kolom B.(4).

Bagian C :

☐ Jumlah Bagian C.(4) # penjumlahan item pada kolom C.(4).

Form 1770 S

☐ A.1. # Akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1/1721-A2 angka 14

☐ A.2. # Lampiran l 1770 S Jumlah Bagian A

☐ A.4. # (A.1. + A.2. + A.3.)

☐ A.6. # (A.4. - A.5.)

☐ B.7. # nilai PTKP

☐ B.8. # (A.6. - B.7.)

☐ C.9. # PENERAPAN TARIF Pasal 17 x B.8.

☐ C.11. # C.9 + C.10.

☐ D.12. # 1770 S - l Jumlah Bagian C.(7)

☐ D.13. # (C.11 - D.12) atau D.13. # (D.12. - C.11.)

☐ D.15. # (D.14.a + D.14.b. + D.14.c.)

☐ E.16. # (D.13. - D.15.) atau E.16. # (D.15. - D.13.)

☐ F # (13./12)

II. Ketetapan waktu penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 29 :

1. Tanggal Masuk SPT : ..... (tepat waktu / terlambat)
2. Tanggal Pembayaran PPh Pasal 29 : ..... (tepat waktu / terlambat)

....., ...-.....-20.....
Operator Data Entry,

.....
NIP.....

D.1.1.22.03

LEMBAR PENELITIAN SPT 1770 SS
DENGAN KOMPUTER

NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
NAMA WP : .....
TAHUN PAJAK : .....

I. <u>Unsur-unsur dalam SPT yang salah/seharusnya diisi :</u>

Form 1770 SS

☐ # Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun.

☐ # Jumlah keseluruhan kewajiban/utang pada akhir tahun.

II. Ketepatan waktu penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 29 :

1. Tanggal Masuk SPT : ..... (tepat waktu / terlambat)

....., ...-.....-20.....
Operator Data Entry,

.....
NIP.....

Beri tanda √ dalam ☐ yang sesuai
D.1.1.22.02

LEMBAR PENELITIAN SPT 1771
DENGAN KOMPUTER

NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
NAMA WP : .....
TAHUN PAJAK : .....

I. <u>Unsur-unsur dalam SPT yang salah/seharusnya diisi :</u>

Form 1771 - I

☐ Jumlah 1.d. # (1.a. - 1.b. - 1.c.)
☐ Jumlah 1.d dan e # (1.d. + 1.e.)
☐ Jumlah 5.a s.d l # (5.a. + 5.b. + ... + 5.k. + 5.l.)
☐ Jumlah 6.a s.d d # (6.a. + 6.b. + 6.c. + 6.d.)
☐ Jumlah 8 # Jumlah (1. - 4. + 5. - 6. - 7.)

Form 1771 - II

☐ Jumlah PPh Pasal 22.(5). # penjumlahan item PPh Pasal 22.(5).
☐ Jumlah PPh Pasal 23.(5). # penjumlahan item PPh Pasal 23.(5).
☐ Jumlah# Jumlah PPh Pasal 22.(5). + Jumlah PPh Pasal 23.(5).

Form 1771 - III

☐ Jumlah kolom (5). # penjumlahan item pada kolom (5)
☐ Jumlah kolom (6). # penjumlahan item pada kolom (6)

Form 1771 - IV

☐ Jumlah Bagian A(5). # Jumlah (A.1. + A.2. + ... + A.12.)
☐ Jumlah Bagian B(3). # Jumlah (B.1. + B.2. + B.3. +..... + B.7.)

Form 1771 - V

☐ Jumlah Bagian A(5). # penjumlahan item pada kolom (5) dan kolom (7).

Form 1771 - VI

☐ Jumlah Bagian A(5). # penjumlahan item pada kolom (5).

Form 1771

☐ A.1. # 1771-I kolom 8.(3).
☐ C.8.a. # 1771-III kolom JUMLAH.(5)
☐ C.8.b. # Lampiran Khusus 7A kolom (7).
☐ E.a. # 1771-IV Bagian A.JUMLAH.(5).
☐ E.b. # 1771-IV Bagian B.JUMLAH.(3).
☐ A.3. # (A.1. -A.2.)
☐ B.4. # penerapan tarif Pasal 17 x A.3.
☐ B.6. # (B.4. + B.5.)
☐ C.8.c # Jumlah (C.8.a. + C.8.b.)
☐ C.9.a. # B.6. - (C.7. + C.8.c.) atau C.9.b # (C.7. + C.8.c.) - B.6.
☐ C.10.c #(C.10.a. + C.10.b.)
☐ D.11.a. # (C.9. - C.10.e) atau D.11.b # (C.10.e. - C.9.)
☐ E.14.c. # (E.14.a. - E.14.b.)
☐ E.14.d. # penerapan tarif Pasal 17 x E.14.c.
☐ E.14.f. # (E.14.d. - E.14.e.)
☐ E.14.g. # (E.14.f. /12)

II. Ketepatan waktu penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 29 :

1. Tanggal Masuk : ..... (tepat waktu / terlambat)
2. Tanggal Pembayaran PPh Pasal 29 : ..... (tepat waktu / terlambat)

....., ...-.....-20.....
Operator Data Entry,

.....
NIP.....

Beri tanda √ pada kotak ☐ yang diperlukan

D.1.1.22.04

LEMBAR PENELITIAN SPT 1771/$
DENGAN KOMPUTER

NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
NAMA WP : .....
TAHUN PAJAK : .....

I. <u>Unsur-unsur dalam SPT yang salah/seharusnya diisi :</u>

Form 1771 - I/$

☐ Jumlah 1.d. # (1.a. - 1.b. - 1.c.)
☐ Jumlah 1.d dan e # (1.d. + 1.e.)
☐ Jumlah 5.a s.d 1 # (5.a. + 5.b. + ... + 5.k. + 5.l.)
☐ Jumlah 6.a s.d d # (6.a. + 6.b. + 6.c. + 6.d.)
☐ Jumlah 8 # Jumlah (1. - 4. + 5. - 6. - 7.)

Form 1771 - II/$

☐ Jumlah PPh Pasal 22.(5). # penjumlahan item PPh Pasal 22.(5).
☐ Jumlah PPh Pasal 23.(5). # penjumlahan item PPh Pasal 23.(5).
☐ Jumlah# Jumlah PPh Pasal 22.(5). + Jumlah PPh Pasal 23.(5).

Form 1771 - III/$

☐ Jumlah kolom (6). # penjumlahan item pada kolom (6)

Form 1771 - IV/$

☐ Jumlah Bagian A(5). # Jumlah (A.1. + A.2. + ... + A.12.)
☐ Jumlah Bagian B(3). # Jumlah (B.1. + B.2. + B.3. +..... + B.7.)

Form 1771 - V/$

☐ Jumlah Bagian A(5). # penjumlahan item pada kolom (5) dan kolom (7).

Form 1771 - VI/$

☐ Jumlah Bagian A(5). # penjumlahan item pada kolom (5).

Form 1771

☐ A.1. # 1771-I/$ kolom 8.(3).
☐ C.8.a. # 1771-III/$ kolom JUMLAH.(5)
☐ C.8.b. # Lampiran Khusus 7A kolom (7).
☐ E.a. # 1771-IV/$ Bagian A.JUMLAH.(5).
☐ E.b. # 1771-IV/$ Bagian B.JUMLAH.(3).
☐ A.3. # (A.1. -A.2.)
☐ B.4. # penerapan tarif Pasal 17 x A.3.
☐ B.6. # (B.4. + B.5.)
☐ C.8. # Jumlah (C.8.a. + C.8.b.)
☐ C.9.a. # B.6. - (C.7. + C.8.) atau C.9.b # (C.7. + C.8.) - B.6.
☐ C.10. #(C.10.a. + C.10.b.)
☐ D.11.a. # (C.9. - C.10.) atau C.11.b # (C.10. - C.9.)
☐ E.14.c. # (E.14.a. - E.14.b.)
☐ E.14.d. # penerapan tarif Pasal 17 x E.14.c.
☐ E.14.f. # (E.14.d. - E.14.e.)
☐ E.14.g. # (E.14.f. /12)

II. Ketepatan waktu penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 29 :

1. Tanggal Masuk : ..... (tepat waktu / terlambat)
2. Tanggal Pembayaran PPh Pasal 29 : ..... (tepat waktu / terlambat)

....., ...-.....-20.....
Operator Data Entry,

.....
NIP.....

Beri tanda √ pada kotak ☐ yang diperlukan

D.1.1.22.05